

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
DANA HIBAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
MALANG NO.10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT**

(Studi pada Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang)

Skripsi

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

Rhonda Remma Prastama

0810310341



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO

Begitu orang memilih sesuatu, menulis sesuatu, mengatakan sesuatu, entah masuk akal apa tidak, entah merupakan hal yang paling menarik atau bukan, mereka cenderung terpaku pada keputusan itu, terlepas dari bagaimana keputusan itu dibuat.

(Kevin Hogan)



RINGKASAN

Rhonda Remma Prastama, 2013, **Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat (studi pada Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang)**, Komisi Pembimbing Prof.Dr.Agus Suryono, MS, Anggota Drs.Abdul Wachid, MAP

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah pada Kelurahan ciptomulyo kota Malang, berdasarkan pada Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2010. Bagaimana implementasinya pengelolaan dan penggunaan dana hibah di lapangan yang di indikatorkan dalam efektifitas, efisiensi, transparansi, dan juga apakah tujuan dana hibah dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tercapai, serta faktor-faktor pendukung apa yang mendorong implementasi dana hibah ini pada kelurahan ciptomulyo kecamatan Sukun kota Malang, di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil daripada penelitian ini dapat dikatakan bahwa di dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang tercantum sudah sesuai dengan apa yang terkandung di dalam peraturan walikota Malang no.10 tahun 2010, yang di tandai dengan efisiensi, efektifitas, dan Transparansi, sedangkan di dalam penggunaannya sudah dapat dilihat berupa adanya pembangunan jalan, sarana gorong-gorong, pelebaran jalan di dalam pelaksanaannya di kelurahan ciptomulyo. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan sudah terlaksana secara utuh akan tetapi masih saja ada yang kurang di dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bidang pelatihan, dan juga bidang pengembangan home industry yang ada di daerah, kemudian jika bicara partisipasi setiap elemen masyarakat sudah bergerak dan mau untuk ikut berpartisipasi di dalam program dana hibah ini. Mulai dari mereka menyumbang pikiran pada proses perencanaan, dana atau material sampai pada sumbangan berupa tenaga pada proses pelaksanaan dan pengawasan .

Di dalam pelaksanaannya peneliti dapat memberikan saran berupa, hendaknya di dalam program dana hibah juga memberikan bantuan-bantuan bagi usaha-usaha kecil di sekitar kelurahan agar nantinya usaha-usaha kecil tersebut dapat berkembang, di dalam pelaksanaan program dana hibah jika terjadi kendala berupa cuaca ataupun faktor alam yang mengakibatkan tertundanya program, maka hendaknya dalam hal perencanaan dilakukan suatu analisis yang dapat meminimalisir dari kendala cuaca dan alam tersebut.

Kata kunci: **Implementasi, Dana Hibah, Efektif, Efisien, Transparansi, Pemberdayaan, Partisipasi** .

SUMMARY

Rhonda Remma Prastama, 2013, **Implementation of Managing and Utilization Grant-fund according to Peraturan Walikota Malang No.10 th 2010 about Utilization Manual of Grant-fund to People (Study at Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang)**. Guidance committee Prof.Dr.Agus Suryono, MS , guidance member Drs.Abdul Wachid, MAP

This research aiming at understanding, to understand how the shape or form about implementation of managing and utilization grant-fund based from Peraturan Walikota Malang no.10 th 2010. How the implementation going indicated by effectivity, efficiency, transparency and whether goals are achieved, as well as supportive factors that influencing the implementation.at kelurahan ciptomulyo kecamatan Sukun kota Malang

Result of this research describe that the utilization and management of grant fund is going well , as good as the content of Peraturan Walikota Malang no.10 th 2010, indicated by effective, efficient, and transparent. In people empowerment and people participation aspect, implementation is going well too despite the people empowerment still have lack sector in training matter. Then about people participation indicate that many people from different basic of community is interested about participation as well as their contribution like fund, idea, materials even manpower.

Researcher suggest that in implementation of grant fund should providing assistance to small business so they can develop well, if in implementation have weather problem, there should be any analysis to minimize the obstacle

Key word: Implementation, grant-fund, Effective, efficient, Transparency, empowerment, Participation .

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang no.10 tahun 2010 tentang Penggunaan Dana Hibah terhadap Masyarakat”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk S.Sos M.Si Selaku Ketua Jurusan Administarasi Publik
3. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono MS, selaku pembimbing utama dan Bapak Drs. Abdul Wachi, MAP, selaku pembimbing pendamping yang bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun SKRIPSI ini
4. Bapak Rohadi dan ibu Lilik Alfiah, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis, serta keluarga besar.
5. Karyawan dan Karyawati FIA UB
6. Bapak Ir. Wahyudi Sudiono , Selaku Lurah Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang
7. Ibu lilis , selaku staf administrasi kelurahan Ciptomulyo, beserta jajaran yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan SKRIPSI penulis
8. Rachma Vita Oktaviana yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini

Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	
1. Pengertian Pembangunan.....	10
2. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	11
3. Fungsi Administrasi Pembangunan.....	13
4. Ruang lingkup Administrasi Pembangunan.....	14
5. Program Pembangunan.....	14
B. Manajemen Pembangunan	
1. Pengertian manajemen Pembangunan.....	15
2. Pengembangan system manajemen Pembangunan.....	16
C. Implementasi Kebijakan	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2. Implementasi Kebijakan.....	18
3. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan.....	20
4. Model-model Implementasi Kebijakan.....	21
D. Dana Hibah	
1. Pengertian Dana Hibah.....	33
2. Konsep Dana Hibah.....	33
3. Tujuan Dana Hibah.....	34
4. Prinsip Dana Hibah.....	35
5. Jenis Kegiatan Dana Hibah.....	35
E. Efisiensi, Efektifitas dan Transparansi	
1. Efisiensi.....	36
2. Efektifitas.....	37

3. Transparansi.....	39
F. Pemberdayaan Masyarakat	
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	40
2. Prinsip-prinsip dalam Membedaryakan Masyarakat.....	41
3. Aktor-aktor yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	43
4. Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	44
G. Partisipasi Masyarakat	
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	45
2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat.....	46
3. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat.....	48
4. Metode Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Fokus Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	52
D. Jenis Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	
1. Gambaran umum kelurahan ciptomulyo.....	57
2. Dana hibah.....	62
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Implementasi Pelaksanaan Dana Hibah	
a. Implementasi Prinsip Penggunaan dan Pengelolaan.....	65
b. Tercapainya Tujuan Dana Hibah.....	67
2. Faktor Implementasi Dana Hibah	
a. Internal.....	73
b. Eksternal.....	74
C. Pembahasan dan Analisis Data	
1. Implementasi Pelaksanaan Dana Hibah	
a. Implementasi Prinsip Penggunaan dan Pengelolaan.....	75
b. Tercapainya Tujuan Dana Hibah.....	80
2. Faktor Implementasi Dana Hibah	
a. Internal.....	94
b. Eksternal.....	98

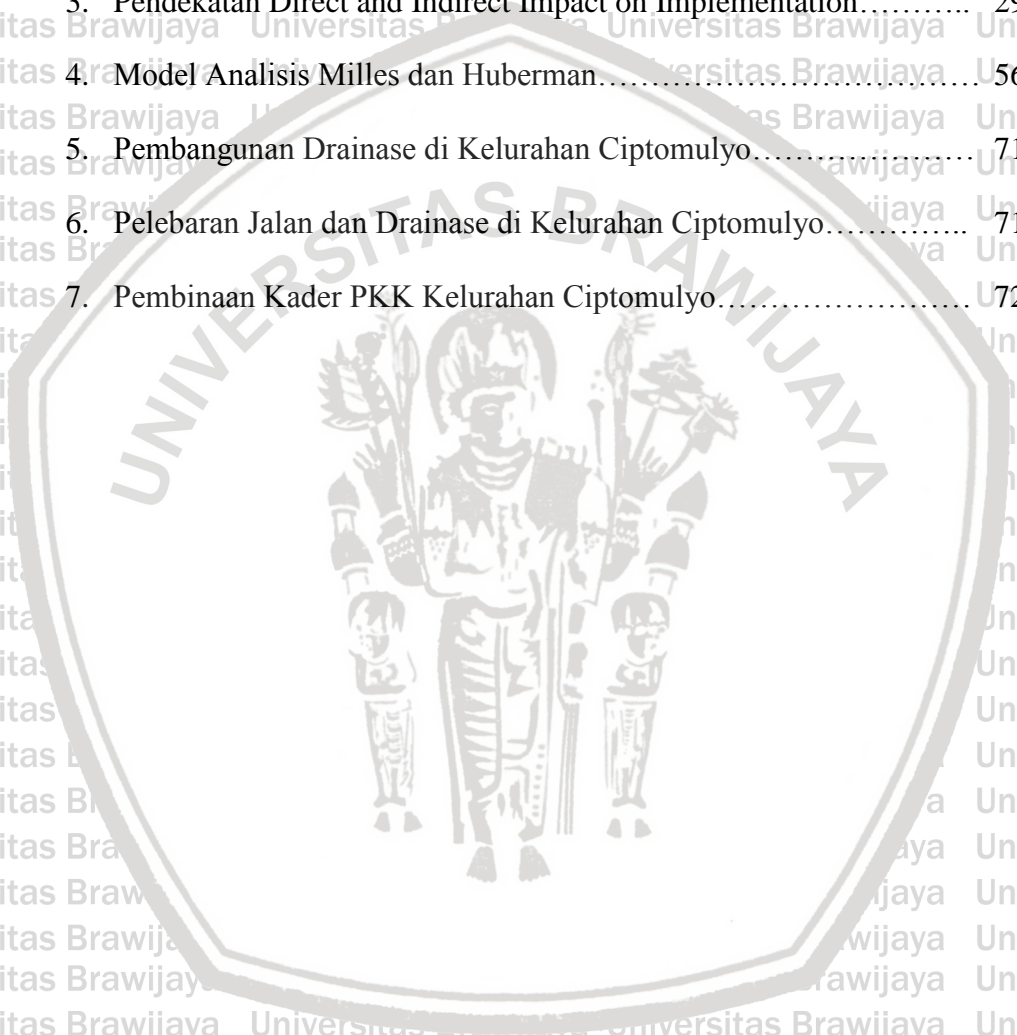
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Model Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	24
2. Model Pendekatan Mazmanizan & Paul Sabatier.....	28
3. Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation.....	29
4. Model Analisis Milles dan Huberman.....	56
5. Pembangunan Drainase di Kelurahan Ciptomulyo.....	71
6. Pelebaran Jalan dan Drainase di Kelurahan Ciptomulyo.....	71
7. Pembinaan Kader PKK Kelurahan Ciptomulyo.....	72



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Aktor-aktor Pemberdayaan Masyarakat.....	43
2. Mata Pencapaian Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2011.....	57
3. Jumlah Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011.....	58
4. Jumlah Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Menurut Agama Tahun 2011.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

1. Rencana Definitif Keuangan Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2011
2. Peraturan Walikota No. 10 tahun 2010 Kota Malang Tentang Dana Hibah
3. Surat Keterangan Riset



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata pembangunan merupakan suatu istilah yang sering kita dengar di sekitar kita, Menurut Sondang P.Siagian dalam Suryono (2010:46) menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Bintoro Tjokromidjojo dalam Suryono (2010:3) menyatakan pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu menuju keadaan yang lebih baik. Dari beberapa pengertian pembangunan tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika pembangunan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terstruktur oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintahan yang bertujuan untuk membawa kearah yang lebih baik dan kearah perbaikan yang lebih terarah menuju modernitas.

Pembangunan sendiri biasanya terkait dengan adanya perubahan dalam bentuk fisik yang disertai dengan adanya penambahan di dalam sarana dan prasarana di dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan berjalannya waktu pembangunan diartikan tidak hanya pembangunan dalam bentuk fisik tetapi juga adanya pembangunan di dalam bentuk non fisik, jadi dapat dikatakan jika pembangunan tidak hanya bersifat membangun suatu bangunan atau prasarana, tetapi istilah

pembangunan juga dapat diartikan pembangunan dalam hal yang bersifat non fisik atau pelatihan-pelatihan.

Sedangkan mekanisme dan prosedur pembangunan mulai dari perencanaan cenderung sebatas formalitas, karena pada akhirnya keputusan yang diambil sepenuhnya oleh pemerintah, cenderung berbeda dengan apa yang sudah disepakati dengan masyarakat dalam musyawarah. Hal ini masih membuat nuansa *top-down* di dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan masih kental, dibandingkan nuansa *bottom-up*.

Di dalam pembangunan terdapat suatu realita yang menarik dimana pada dasarnya menjadi masalah umum, jika semua pembangunan hanya berpusat pada daerah/wilayah kota saja dan tak memihak pada pembangunan di bidang daerah dan pada khususnya desa. Dengan adanya realita ini pemerintah secara langsung merevisi undang-undang sebelumnya menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya membahas hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terjadi korelasi antara peraturan jika diterapkan pada suatu daerah tertentu yang tidak terikat langsung penanganannya dengan peraturan pemerintah pusat dan bahkan saling berkaitan satu sama lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika sebenarnya kewenangan yang dihasilkan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lebih menitik beratkan pada tingkat dasar pengambilan keputusan di daerah yang dapat dikatakan menggunakan system *bottom-up*, yang mana di dalam setiap pengambilan keputusan tingkat daerah selalu melibatkan pemikiran-pemikiran dari tingkat paling kecil. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di suatu daerah sangat berbeda dengan kebijakan daerah yang lain. Hal ini di tandai dengan adanya perbedaan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) yang kualitas dan kuantitasnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Dalam kenyataannya penerapan pasal 33 ayat 4 undang-undang dasar 1945 terlihat beberapa kebijakan atau program pemerintah yang pada dasarnya sangat membantu masyarakat di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah pada khususnya. Program-program lain yang diterapkan oleh daerah, yang sangat banyak dan sangat beragam namanya dan mungkin sangat panjang jika peneliti sebutkan satu persatu. Yang mungkin bisa peneliti sebutkan adalah program dana hibah yang dilaksanakan di kota Malang, atau juga program daerah pesisir di kabupaten Lamongan, atau program Gerbang mas di kabupaten Lumajang. Akan tetapi dari setiap program bantuan tersebut terdapat persamaan yaitu dimana setiap dana bantuan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan biasanya juga untuk meningkatkan tingkat pemberdayaan masyarakat yang sangat minim sekali di daerah-daerah.

Program dana hibah adalah program pembangunan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang mana program ini dilaksanakan di kota Malang terhitung sejak tahun 2009 dan berubah nama menjadi Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada tahun 2012. Dalam pelaksanaannya pada awal program ini menempatkan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) sebagai badan yang ditunjuk dalam pembuatan rencana pembangunan baik fisik maupun non fisik. Selain itu LPMK bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas atas semua kegiatan penyaluran dana hibah. Setelah terjadinya perubahan pada akhir tahun 2011 peran LPMK sendiri hanya menjadi mitra daripada pihak kelurahan di dalam pelaksanaan program dana hibah. Karena pada tahun 2012 pihak kelurahan sudah menjadi SKPD (Satuan perangkat Kerja daerah). Perubahan ini di dasarkan pada terjadinya perubahan undang- undang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 39 Tahun 2012, tentang Bantuan Sosial dan Dana Hibah. Yang mengatakan bahwa Besaran dana hibah dari tahun ketahun mengalami kenaikan mulai dari 50 juta pada tahun 2009/2010 sampai pada periode 2011/2012 menjadi 500 juta dalam satu periode, dalam pencairannya sendiri dana hibah dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap pertama mendapatkan 50% dan tahap kedua 50%, untuk alokasinya sendiri dana hibah di bagi menjadi dua yaitu, maksimal sebesar 40% untuk pembangunan non fisik, dan minimal sebesar 60% untuk kegiatan fisik. Dalam peraturan Walikota No.10 tahun 2010 yang mendasari dana hibah, prinsip dana hibah di bagi menjadi tiga yaitu prinsip pengelolaan dan penggunaan, prinsip

pelaksanaan, dan prinsip pertanggungjawaban. Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah adalah efektif, efisien dan transparan.
- 2) Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya.
- 3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelurahan ciptomulyo adalah kelurahan yang terletak pada kecamatan Sukun kota malang, yang mana kelurahan ini di tumbuhi oleh berbagai pabrik-pabrik, kelurahan ini memiliki usaha mandiri unggulan berupa usaha jamu yang dapat dikatakan menjadi usaha yang menjadi aset utama di dalam kelurahan ciptomulyo akan tetapi usaha ini dapat dikatakan usaha mandiri yang belum terjamah bantuan pemerintah, di samping itu di dalam penerapan program dana hibah dalam bentuk pembangunan non fisik, cenderung tidak berisikan pelatihan-pelatihan yang bersifat produktif, atau menghasilkan. Selain itu dari kondisi sarana dan prasarana jalan kampung di kelurahan ciptomulyo cenderung rusak dan perlu perbaikan, di tandai banyaknya jalan berlubang dan banyaknya drainase yang mampet saat hujan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melihat implementasi dari salah satu prinsip dana hibah di lapangan, yang lebih tepatnya prinsip pengelolaan dan penggunaan dana hibah. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Malang, di daerah Kecamatan Sukun Kelurahan Ciptomulyo,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun ?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi pengelolaan dan penggunaan dana hibah di Kelurahan Ciptomulyo

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui , mendeskripsikan , dan menganalisis , implementasi dari pengelolaan dan penggunaan program dana hibah di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung apa saja yang mempengaruhi di dalam implementasi prinsip pengelolaan dan penggunaan dana hibah di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik teoritis maupun praktis terhadap permasalahan. Adapun kontribusi penelitian yang ingin di capai antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Ilmu Administrasi Publik pada umumnya, yang berhubungan dengan implementasi program pemerintah

Kota Malang dan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis, dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi para aktor pembangunan masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Ciptomulyo dan pemerintah Kota Malang mengenai implementasi prinsip penggunaan dan pengelolaan Dana Hibah di masyarakat dan pembangunan wilayah Kota Malang

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi proposal skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian. Kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan data pernyataan peneliti yang meliputi konsep dan pengertian dari judul dan permasalahan yang diangkat, adapun teori-teori yang digunakan adalah teori manajemen

pembangunan, teori pemberdayaan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan teori partisipasi.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian berupa penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, fokus penelitian, situs penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu penyajian data dan intepretasi data, dalam penyajian data dikemukakan gambaran umum Kelurahan Ciptomulyo, lokasi tempat penelitian pada kelurahan ciptomulyo dan masyarakat sekitr kelurahan ciptomulyo, proses pengelolaan dan penggunaan dana hibah yang terjadi pada kelurahan Ciptomulyo, faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam proses implementasi penggunaan dan pengelolaan Dana Hibah pada Kelurahan ciptomulyo Kecamatan Sukun , kemudian dari penyajian data yang ada ini akan dianalisa dan dimplementasikan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan disertai dengan saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pelaksanaan dan penggunaan program Dana Hibah di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Paradigma pembangunan telah melewati berbagai perubahan dan perkembangan makna di dalamnya, ada yang pada awalnya mengandalkan pola pertumbuhan hingga memunculkan paradigma baru tentang pembangunan.

Menurut Yustika (2002:75) bahwa :

“Paradigma pembangunan yang selama ini diajalkan oleh semua negara pada intinya mengacu pada kedua paham yang hingga saat ini masih dominan, yakni kapitalisme dan sosialisme. Sungguhpun pada perkembangannya muncul varian-varian baru dalam paradigma pembangunan missal, *welfare state*, *social market economy*, dan ekonomi pancasilan pada perkembangannya memang paham kapitalisme jauh lebih unggul dari pada paham sosialisme. Kapitalisme melalui doktrinnya: *best government is less intervention, free market economy*, dan *capital oriented*, kapitalisme secara relative akan langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi negara yang menerapkannya.”

Berbeda dengan pendapat diatas, Kuncoro (2004,12) mengemukakan bahwa paradigma baru dari pembangunan meliputi pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*selfreliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian kepada alam (*ecodevelopment*) dan pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*)

Selanjutnya menurut Siagian dalam Suryono (2001: 21) bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara,

dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pengertian tersebut senada dengan apa yang disampaikan Djojohadikusumo dalam Soetomo (2011:33) yang menafsirkan pembangunan sebagai jalan keluar dari lingkaran kemancetan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mewujudkan kemajuan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendapat ini mengisyaratkan jika pembangunan adalah suatu cara untuk keluar dari suatu keadaan yang kurang baik menuju ke dalam hal yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana yang mana kegiatan ini bertujuan untuk membuat perubahan menuju kearah yang lebih baik, yang mana pembangunan sendiri pada saat ini tidak hanya dititik beratkan pada pembangunan yang bersifat fisik saja akan tetapi yang bersifat kearah sosial dan lingkungan juga. Biasanya di negara sedang berkembang dalam melakukan pelaksanaan pembangunan sampai saat ini penekanannya sampai saat ini pada pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Penerapan konsep pertumbuhan di dalam pembangunan biasanya hanya berorientasi pada pertumbuhan masyarakat yang tumbuh secara pesat namun tidak mengalami pemerataan.

2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Pengertian administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Definisi administrasi sendiri adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan definisi pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menuju kesejahteraan bangsa.

Pembangunan sendiri merupakan usaha yang dilakukan bangsa untuk menuju kesejahteraan. Menurut Tilaar dalam Suryono (2008:20) definisi pembangunan yaitu pertama, pembangunan bukanlah semata-mata untuk mencapai tujuan dan target pembangunan itu sendiri tetapi pembangunan itu diadakan untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Kedua, pembangunan dilakukan oleh manusia untuk manusia.

Sehingga dapat disimpulkan definisi administrasi pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir (Siagian, 2005:5). Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1988:11&177) administrasi pembangunan berorientasi kepada usaha-usaha yang lebih meningkatkan kemampuan administratif untuk mendorong perubahan kearah keadaan yang lebih baik daripada suatu masyarakat di masa depan, dan administrasi pembangunan lebih bersifat pembaharuan, merintis atau memelopori sehingga terjadi proses pembaharuan yang dikehendaki (*innovation degree of pioneering*).

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan jika administrasi pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan dan dikehendaki oleh suatu bangsa dan negara yang dilakukan secara sadar dan

terencana dalam semua segi kehidupan di dalam suatu negara sehingga terjadi suatu perubahan di dalam pembangunan yang dikehendaki dan menuju kearah yang lebih baik

3. Fungsi Administrasi Pembangunan

Seperti dikemukakan diatas administrasi pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan oleh bangsa dan negara yang dilakukan secara sadar di dalam semua segi kehidupan untuk membawa kearah perubahan yang dikehendaki dan menuju lebih baik. Setidaknya ada dua fungsi dari administrasi pembangunan itu yang secara sederhana digambarkan dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembangunan/Penyempurnaan Administrasi Negara
 - 1) Kepemimpinan administratif, kepemimpinan innovator dan administrator pembangunan
 - 2) Pendayagunaan kelembagaan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan)
 - 3) Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan dan latihan)
 - 4) Pendayagunaan ketatalaksanaan (kalau dikaitkan dengan organisasi disebut masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur dan tata kerja)
- b) Penyempurnaan administrasi bagi penyelenggaraan proses pembangunan
 1. Administrasi perencanaan dan pemrograman pembangunan
 2. Administrasi mobilisasi dana pembangunan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sistem dan administrasi perpajakan
 3. Administrasi pembiayaan pembangunan.
 4. Administrasi/manajemen program dan proyek pembangunan. Termasuk berbagai cara kordinasinya
 5. Administrasi/sistem pengendalian dan pengawasan. (pengawasan atasan langsung atau pengendalian manajemen dan pengawasan fungsional) (Montgomery dalam Bintoro Tjokromidjo 1988:12-13)

Dapat disimpulkan jika fungsi dari administrasi pembangunan itu sendiri tidak hanya di dalam di dalam pembangunan itu sendiri, tapi juga di bidang perbaikan di dalam proses administrasi di dalam pembangunan mulai dari sektor

kelembagaan sampai pada sektor kepegawaian. Selain itu adanya juga penyempurnaan di dalam administrasi di dalam pembangunan itu sendiri mulai dari sistem perencanaannya sampai pada sistem pengawasan dari program pembangunan tersebut.

4. Ruang Lingkup Administrasi pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian administrasi oleh negara untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam proses tersebut diperlukan tentang ruang lingkup administrasi pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Bintoro Tjokromidjodjo (1988:15) yaitu:

- a) Penyempurnaan administrasi negara, meliputi:
 - 1) Kepemimpinan, kordinasi, pengawasan
 - 2) Administarsi fungsional kepegawaian, keuangan dan sarana-sarana lain Dan perlembagaan dalam arti sempit
- b) Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pembangunan meliputi :
 - 1) Proses-proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi maupun proses politik).
 - 2) Tata pelaksanaannya secara efektif.

5. Program Pembangunan

Suatu rencana operasional tahunan akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif, adanya suatu inisiatif baru. Pendekatan eksperimentil dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah.

Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat sering ditanggulangi dengan suatu program.

Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat

kemudian mengembangkan motivasi, kegairahan dan inisiatif

(Tjokroamidjojo,1988:195). Selain itu menurut Bintoro suatu program yang baik

harus memiliki ciri-ciri.

- a. Tujuan yang dirumuskan jelas
- b. Penentuan Peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dengan program tersebut
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut
(Bintoro Tjokroamidjojo,1988:195-196)

B. Manajemen Pembangunan

1. Pengertian Manajemen Pembangunan

Pembangunan sendiri tidak terlepas dari pada pengelolaan, jadi dapat disebutkan jika di dalam pembangunan terdapat manajemen pembangunan sendiri.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1988:106) Manajemen Pembangunan adalah manajemen keseluruhan usaha pembangunan oleh masyarakat dimana pemerintah

berperan sebagai *fly wheel*. Peranan sebagai *agent of change* yaitu *transfer of technology, transfer of value*, pengembangan keswadayaan partisipasi dan *capacity building*

Manajemen Pembangunan sendiri sudah banyak yang melembaga di Indonesia sistem Manajemen Pembangunan adalah suatu tata pola perumusan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pasca kebijakan dan program-program pembangunan secara jangka panjang, menengah dan operasional tahunan (Bintoro Tjokromidjojo 1988:107)

Secara umum manajemen pembangunan adalah usaha dari dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja program pembangunan yang dimana di dalam pelaksanaan pembangunan semua sektor ikut berperan mulai dari pada sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat yang mana di dalam pelaksanaannya pemerintah berperan sebagai roda penghubung atau yang disebut dengan *fly wheel*.

2. Pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan

Setelah adanya manajemen pembangunan, maka secara tidak langsung akan membuat adanya cara di dalam pengembangan manajemen pembangunan tersebut. Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam bukunya berjudul manajemen pembangunan (1988:65-70), perlu adanya pengembangan di dalam sistem manajemen pembangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian antara lain:

- a. Mengenai perencanaan, pengendalian dan pensiunan kepegawaian
- b. Sistem pengelolaan mobilisasi dana pembangunan
- c. Sistem perencanaan dan penganggaran
- d. Mengenai sistem pembiayaan pembangunan
- e. Sistem pengelolaan aset fisik dan peralatan
- f. Mengenai sistem pelembagaan dan tata hubungan kerja antar lembaga
- g. Sistem perizinan dan prosedur yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat
- h. Sistem pengendalian dan pengawasan

Dapat disimpulkan jika di dalam proses pengembangan di dalam sistem manajemen pembangunan banyak meliputi proses-proses awal dari pada pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan, perizinan, sampai pada proses pengendalian dan pengawasan.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah bentuk proses pengambilan keputusan dari administrasi publik. Menurut Anderson dalam Islamy,(2003:17)

“Kebijaksanaan itu adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu)”

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Easton Dalam Islami (2003:19-20) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat, berdasarkan definisi ini Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemelihan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Sedangkan apa yang diungkapkan oleh Abdul Wahab (2008:25) Kebijakan publik sebagai program ialah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif kusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program ini biasanya mencakup

serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan pengarahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Dimana program-program tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Sedangkan Chief J.O Udoji (1981) dalam Abdul Wahab (2008:59) menjelaskan bahwa kebijakan negara sebagai “an sanctioned course of action addressed to particular problem or group or related problems that effect society at large”. (Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang memepengaruhi sebagian besar masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik atau *public policy* adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Proses sebuah kebijakan publik melewati beberapa tahap yaitu, perumusan kebijakan (formulasi), pelaksanaan kebijakan (implementasi) dan evaluasi kebijakan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan Abdul Wahab (2008:59) menyampaikan bahwa :

“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatirer mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk UU, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah tahapan tertentu biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian out put kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana ” (Wahab, 2008:68-69)

Sedangkan pendapat dari Danial A. Mazmanian dan Paul A. dalam Abdul Wahab (2008:65) menjelaskan makna implementasi adalah:

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat”.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut, *policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*

Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dapat disimpulkan jika implementasi kebijakan adalah suatu tahapan selanjutnya dari pada tahap awal pengesahan undang-undang atau keputusan yang

telah dibuat dan telah dilaksanakan baik oleh satu badan maupun oleh sejumlah badan pemerintahan ataupun badan swasta yang telah diundang-undangkan atau diatur sebelumnya oleh suatu otoritas atau kewenangan

3. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan maka perlu adanya langkah-langkah implementasi kebijakan. Menurut Soenarko (2005:187-191) mengungkapkan tentang langkah-langkah dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

a. *Interpretation*

Interpretation, dalam kebijakan disini adalah berusaha mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijaksanaan dalam mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan, harus direalisasi. Program pelaksanaan, yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan , haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijaksanaan.

b. *Organization*

Organization dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dimaksud sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.

c. *Aplication*

Aplication adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu.

4. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam studi implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa model yang digunakan untuk memudahkan pemahaman proses implementasi kebijakan.

Tujuan pokok diciptanya suatu model implementasi kebijakan publik adalah yakni untuk mengefektifkan, menjelaskan, meniru, meramalkan, mencoba dan menguji hipotesis Abdul Wahab, (2008:75). Model yang operasional diperlukan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Dalam Parson (2005:101-107) memaparkan beberapa model implementasi kebijakan dengan deskripsi ringkas mengenai masing-masing model, yaitu sebagai berikut :

- a. *Implementation as perfect administration*, Penggagas model ini adalah Christopher Hood 1976. Model ini memandang system administrasi sebagai sebuah kesatuan dengan jalur kewenangan yang tunggal dan jelas, pelaksanaan dan penerapan aturan atau tujuan yang seragam, seperangkat tujuan yang jelas dan dapat diimplementasikan atas dasar kewenangan atau kepatuhan yang sempurna atau control administrative, koordinasi dan informasi yang sempurna di dalam dan antara unit-unit administrative, tidak terpacu pada waktu, sumberdaya material yang tidak terbatas, untuk mengatasi masalah serta tujuan-tujuan yang jelas dengan akseptabilitas politik atas kebijakan yang hendak dijalankan.
- b. *Implementation as Policy Management*, Model ini diintrodusir oleh Sabartier dan Mazmanian 1979 dengan berisikan panduan bagi keberhasilan implementasi. Mereka menyatakan bahwa program didasarkan atas seperangkat teori menyangkut hubungan antar perilaku kelompok sasaran

dengan pencapaian tujuan kearah yang dikehendaki, dimana program atau kebijakan tersebut berisikan tujuan dan arah atau panduan serta struktur proses implementasi sehingga kelompok sasaran akan menunjukkan perilaku sebagaimana diinginkan. Para pemimpin di dalam organisasi pelaksana memiliki keahlian manjerial dan politik serta komitmen terhadap tujuan kebijakan. Singkatnya, Kondisi-kondisi yang dibutuhkan bagi keberhasilan implementasi adalah teknologi, tujuan yang jelas, keahlian, dukungan dan konsensus.

c. *Implementation as evolution*. Diintrodusir oleh Majone & Mildavsky 1984 dengan beranjak dari karya Wildavsky yang telah memperkenalkan teori tentang proses implementasi yang mencakup pendefinisian kembali tujuan-tujuan dan reinterpretrasi atas dampak kebijakan yang berarti itu adalah proses evolusi. Konsep evolutif daripada implementasi adalah bahwa proses implementasi tidak dapat dipisahkan dari proses formulasi kebijakan, redefinisi, dan reinterpretasi atas tujuan-tujuan dan dampak kebijakan. Implementasi adalah proses yang berlangsung terus menerus seiring dengan terus berlangsungnya reformulasi kebijakan.

d. *Implementation as learning*. Diintrodusir oleh Browne & Wildavsky 1984 dengan beranjak dari inspirasi yang dikemukakan oleh Wildavsky tentang interpretrasinya yang cukup menarik mengenai sifat daripada proses implementasi yang dimodelkan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus dimana implementor terlibat di dalam, proses yang secara terus-menerus memperbaiki fungsi pencapaian tujuan dan teknologi yang sesuai bagi program atau kebijakan yang bersangkutan. Model proses implementasi ini dipandang sebagai bagian dari versi pendekatan "*top-down-naïve implementation, perfect administration, a hierarchical model*",

e. *Implementation as structure*, Diintrodusir oleh Hjern & Porter 1981 yang memendang struktur implementasi sebagai unit analisis administrative yang strukturnya terdiri dari anggota anggota organisasi dengan pandangan atas program yang didasarkan pada kepentingan utama mereka. Struktur implementasi mencakup seperangkat aktor yang hanya terpaut dengan satu struktur implementasi.

f. *Implementation as outcome*. Diintrodusir oleh Fudge & Barrett 1979 yang menyatakan bahwa teori tentang proses implementasi beranjak dari sebagian konsep implementasi yang menyatakan bahwa implementasi bukanlah "*putting policy into effect*" yang menekankan pada pengabaian atas interaksi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Konsep tentang proses implementasi merupakan unit analisis yang terpisah.

g. *Implementation as prespective*. Diintrodusir oleh Walter William 1982 yang berargumentasi bahwa perspektif yang secara khusus mengenai suatu kebijakan adalah langkah awal bagi pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Perspektif implementasi adalah ilmu dan pengetahuan praktis dibidang administratif yang dimiliki oleh perumus dan pelaksana kebijakan yang memungkinkan mereka mengembangkan pendekatan terhadap implementasi kebijakan. Perspektif implementasi ini biasanya dimiliki oleh para praktisi bukan sembarang aktor yang berpartisipasi dalam proses implementasi.

h. *Implementation as backward mapping*. Diintrodusir oleh Elmor 1978, 1982 yang berargumentasi bahwa sebagian besar analisis implementasi difokuskan pada mereka yang menduduki posisi tinggi pada struktur otoritas publik. Padahal analisis implementasi sebenarnya menghendaki dipusatkannya perhatian pada mereka yang bertanggungjawab atas dampak yang terjadi dari aktifitas atau pelaksanaan tugas dari sehari-hari. Proses implementasi sebenarnya bersangkutan paut dengan perilaku mereka yang secara langsung berhadapan dengan *output*, yaitu mereka yang berada jauh dari puncak hirarki atau bersangkutan paut secara langsung dengan "*delivery-level mechanism*".

i. *Implementation as symbolism*. Diintrodusir oleh Edelman 1971 yang menyatakan bahwa studi Implementasi tidak hanya menyadari bahwa para implementor dapat saja menghalang-halangi perubahan ataupun pendekatan baik menyangkut tujuan-tujuan ataupun program-program dalam kerangka interpretasi mereka, kadang-kadang perumus kebijakan sendiri menganggap perlu dan menguntungkan untuk mengabaikan implementasi kebijakan. Fakta menunjukkan bahwa proses implementasi adalah bentuk nyata dari simbolisasi politik dengan jalan melontarkan pernyataan bahwa mereka seolah-olah bersungguh-sungguh hendak mengimplementasikan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan mampu atau tidaknya gagasan tersebut diwujudkan.

j. *Implementation as ambiguity*. Diintrodusir oleh Baier 1986 dengan mengemukakan tujuan bahwa ambiguitas kebijakan adalah instrument strategik yang dimanipulasi oleh para politisi. Dalam pandangan ini, implementasi gagal karena birokrasi tidak cukup mampu atau terlalu otonom. Kesulitan di dalam mencapai keberhasilan implementasi disebut dengan istilah "*implementation deflor*" dimana keadaan ini mencerminkan hambatan serius bagi implementasi akibat merajalelanya ambiguitas dalam berbagai kebijakan sehingga implementasi gagal bukan karena kesenjangan atau "gap" antara perumusan kebijakan yang rasional dan implemntasi yang tidak sempurna.

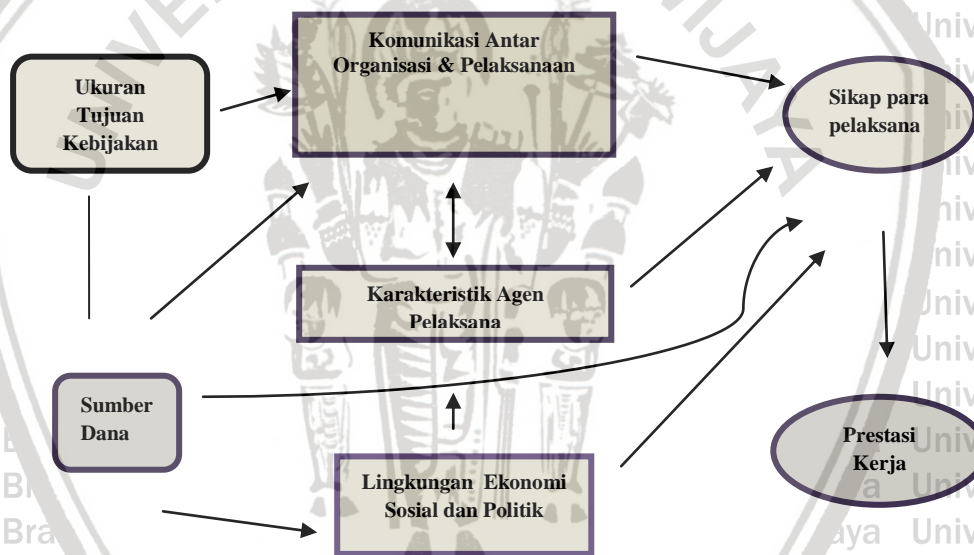
k. *Implementation as coalition*. Diintrodusir oleh Sabatier 1986 dengan mengemukakan bahwa dalam proses implementasi terdapat sesuatu yang disebut dengan "*advocacy coalition*" yaitu aktor-aktor yng berasal dari orgnisasi public dan privat yang saling berbagi seperangkat keykinan atau kepercayaan dan berusaha untuk merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Model baru ini disebut dengan istilah "*hybrid model*" yang dikembangkan dari dua sumber yaitu "*policy network framework*" dari Richardson dan Jordan 1979, Dunleavy 1985, Sharpe 1985 dan hipotesis bahwa implementasi itu pada dasarnya adalah pembelajaran yang dikembangkan oleh Brownly dan Wildavsky 1984. Komponen lain dari teori implentasi ini adalah penekanan pada proses belajar jangka panjang yang terjadi di dalamnya. Perubahan kebijakan adalah sebagai hasil dari "*policy oriented learning*" melalui sejumlah koalisi atau "*policy brokers*".

Model lain dari implementasi kebijakan public dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Pendekatan implementasi kebijakan Donald Van meter dan Carl Van Horn merupakan model dengan pendekatan top-down yang disebut juga dengan A *model of the policy implementation*. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik (Dwijowijoto, 2006:128).

Gambar 1: Model Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn.



Sumber: Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino:144)

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau peformansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel

(Agustino, 2008:141-142). Adapun variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu:

- 1) ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) sumber daya yang tersedia;
- 3) karakteristik agen pelaksana;
- 4) sikap atau kecenderungan para pelaksana;
- 5) komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana serta;
- 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik

b. Pendekatan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Menurut kedua ahli ini dalam Abdul Wahab (2008:71), untuk melaksanakan implementasi kebijakan publik diperlukan beberapa syarat antara lain:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- 2) Tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk implementasi program.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat.

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dari syarat-syarat yang ada dalam model ini, tersirat bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang perlu ditekankan adalah kesiapan dari lembaga pelaksana saja tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sasaran dan faktor-faktor eksternal lainnya. Sedangkan pada kenyataannya, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat sasaran dan faktor eksternal lainnya, dimana suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya sehingga perlu adanya penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat sasaran.

c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Model ini disebut juga *A frame work for implementation analysis*, Daniel Mazmanian dan P sabatier berpendapat bahwa yang berperan paling penting dalam analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pasa keseluruhan proses implementasi. Mazmanian dan Sabatier juga mengklasifikasikan proses implementasi menjadi tiga variabel besar dalam Dwijowijoto, (2004:169).

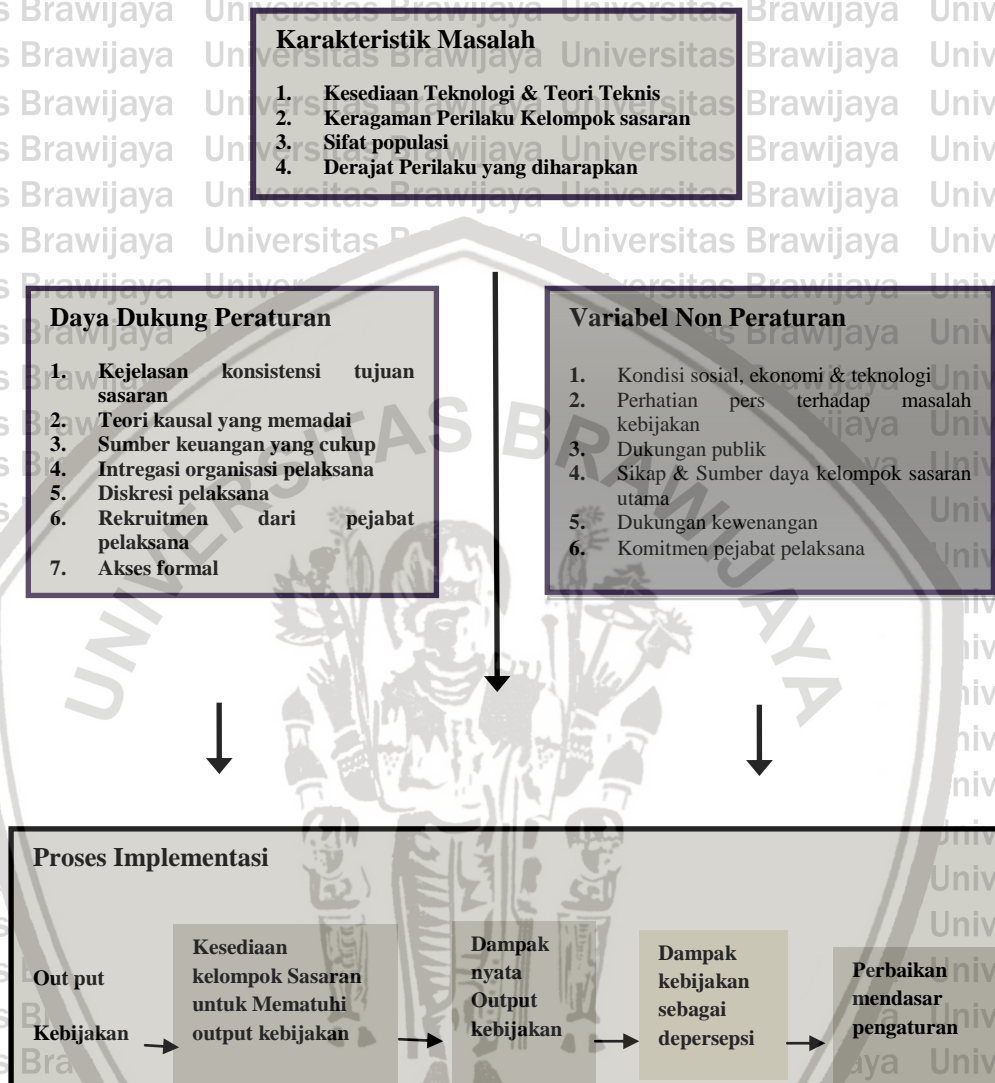
Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

Yang kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan

konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana. Perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan resources dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependden yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 2: Model Pendekatan Mazmanian & Paul Sabatier



Sumber: Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino, 2008:149)

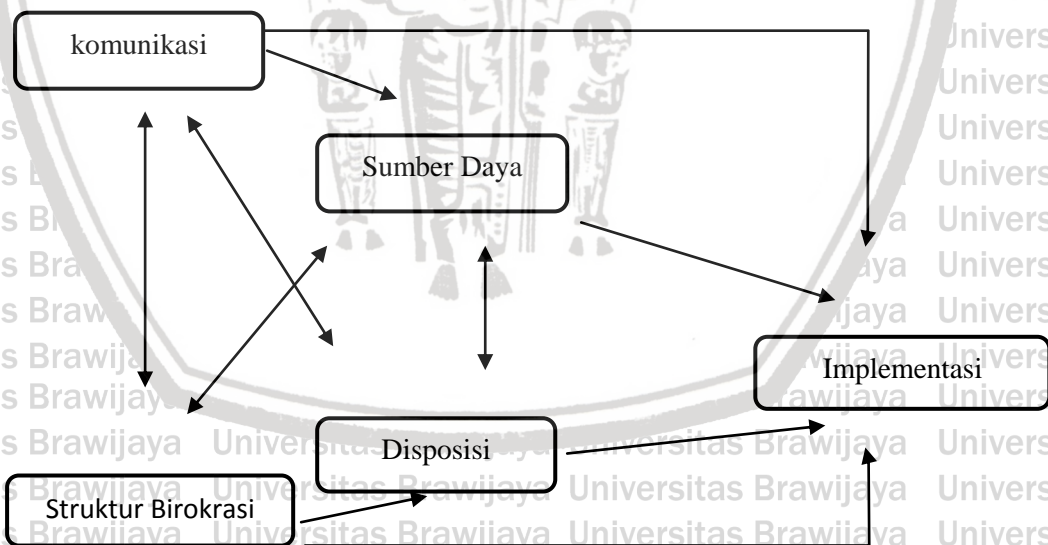
Model Mazmanian dan Sabatier menurut Abdul Wahab (2008;83) dalam hubungannya antara variabel ini, bahwa tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain, misalnya, tingkat kesiediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang teruat dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan dari badan-badan (instansi) pelaksanaan akan

berpengaruh terhadap dampak nyata (actual impact) keputusan-keputusan tersebut.

d. Model Direct and Indirect Impact on Implementation

Pendekatan Direct and Indirect impact on Implementation adalah salah satu model implementasi kebijakan berspektif top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III, pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat elemen yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, empat elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George C. Edward III)



Sumber: Dasar-dasar kebijakan publik (Agustino, 2008:150)

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008: 150) adalah komunikasi. George C. Edward III menganggap komunikasi dibutuhkan dalam implementasi kebijakan publik karena:

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan dengan tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan juga harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi ini harus mencakup bagian-bagian yang berhubungan dengan aspek kebijakan, baik dengan para pembuat keputusan, implementor dan dengan masyarakat.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008: 152) sumberdaya merupakan hal penting lainnya dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi :

- 1) Staf; kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau kemungkinsn tidak kompetennya dalam penguasaan bidang. Keahlian dan kemampuan diperlukan dalam implementasi kebijakan.
- 2) Informasi; informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada publik agar dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, sasaran kebijakan. Agar para pelaksana kebijakan memahami apa yang menjadi harapan implementasi kebijakan tersebut.

3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat normak agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara politik, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menghambat dan bahkan menggagalkan proses implementasi bulik.

4) Fasilitas; implementor mungkin memiliki staf mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan (kompeten dan kapabel), dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:153) adalah struktur birokrasi.

Struktur birokrasi juga merupakan hal terpenting di dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melakukan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Suatu kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif kepada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Empat variabel tersebut sangat mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan publik. Jika dalam implementasi kebijakan publik salah satu aspek atau variabel tidak berjalan lancar maka implementasi kebijakan juga akan mengalami kendala, dengan kata lain tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

e. Model Implementasi Kebijakan Gogging

Model ini merupakan generasi ketiga model implementasi kebijakan, seperti dalam Dwijowijoto (2004:444):

Malcolm Gogging, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebut sebagai “Communication Model” untuk implementasi Gogging dkk bertujuan untuk mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independent, interverning, dan dependen dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Dari semua model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dalam hal ini seorang pembuat kebijakan dalam pengimplementasian kebijakan jangan sampai keliru pada saat memaknai atau menjalankan suatu kebijakan karena ketika pada saat awal mengalami kekeliruan maka kedepannya keberlangsungan kebijakan tersebut akan tidak berjalan sebagaimana mestinya sedangkan sistem kontroling juga tidak akan berjalan secara maksimal.

Banyak sekali model-model implementasi kebijakan yang ditawarkan, akan tetapi manakah model-model yang cocok dengan kebijakan yang ada pada penelitian ini, peneliti nantinya menggunakan model yang dikembangkan oleh Bryan B. Hogwood dan Luis A. Gunn karena menurut peneliti, model ini sesuai

dengan permasalahan yang diambil. Model ini memandang bahwa implementasi kebijakan berjalan secara berbeda di dalam pelaksanaannya di daerah satu dan lain yang mana sesuai dengan implementasi dalam program dana hibah yang berbeda antara satu kelurahan dengan kelurahan lain di dalam pelaksanaan dana hibah.

D. Dana Hibah

1. Pengertian Dana Hibah

Berdasarkan peraturan Walikota Malang no.10 tahun 2010 mengatakan bahwa, Dana Hibah adalah penerimaan lembaga kemasyarakatan yang berasal dari Pemerintah Kota Malang dalam bentuk uang yang tidak perlu dibayarkan. Dalam Permen no.39 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

2. Konsep Dana Hibah

a. Pendekatan Program

Pendekatan yang digunakan dalam penerapan program dana hibah adalah *Community Based Development*, yaitu pendekatan pembangunan yang mengutamakan pemenuhan kegiatan sedang dan akan dilaksanakan harus dilandasi oleh orientasi dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan warga masyarakat (*People Oriented and People Centered*)

Pendekatan seperti ini telah banyak terbukti efektif untuk menggali dan mengoptimalkan sumber kekuatan yang tersembunyi dalam komunitas masyarakat. Sehingga diharapkan mampu menghapus pengaruh kepentingan individu dan kelompok tertentu dalam proses pembangunan di kelurahan

b. Pola Penerapan Program

Pola penerapan yang dikembangkan dalam program Dana Hibah Kelurahan adalah pola partisipatif, artinya penerapan program ini dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang partisipatif, dalam arti memberi ruang yang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan ditingkat bawah sampai kota. Dengan demikian, penerapan program ini tidak memakai pola semata-mata arahan dari atas kebawah (*top-down*) ataupun kehendak dari bawah ke atas (*bottom-up*) akan tetapi merupakan perpaduan keduanya sehingga mengarah kepada pola kebersamaan antar pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sumber : Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Tahun 2011

3. Tujuan Dana Hibah

Dalam Peraturan Walikota Malang No.10 tahun 2010, tujuan Dana Hibah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk memilih sendiri jenis-jenis kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dianggarkan secara khusus dan

nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;

- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan.

4. Prinsip Dana Hibah

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 tahun 2010, prinsip Dana Hibah dibagi menjadi tiga ,yaitu:

- a. Prinsip pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah adalah efektif, efisien dan transparan.
- b. Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya.
- c. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jenis Kegiatan Dana Hibah

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.10 tahun 2010, jenis kegiatan Dana Hibah, yang dapat dilaksanakan merupakan kegiatan pembangunan Kelurahan yang aspiratif dengan berpedoman pada hasil Musrenbangkel dan atau kebutuhan yang mendapat persetujuan masyarakat melalui musyawarah. Jenis kegiatan untuk Dana Hibah yang tidak dapat dilaksanakan, terdiri dari :

- a. Pembebasan lahan;
- b. Perkreditan/Simpan Pinjam;

- c. Kegiatan Politik;
- d. Pembangunan kantor pemerintah;
- e. Tempat Ibadah;
- f. Kegiatan seremonial kemasyarakatan.

D. Efisiensi Efektifitas dan Transparansi

1. Efisiensi

Efisiensi adalah istilah yang terdapat di dalam ilmu manajemen ataupun keuangan. Menurut Dearden dalam Maulana(1997:46) pengertian efisiensi adalah sebagai berikut, “Efisiensi diartikan sebagai kemampuan suatu unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh perusahaan”. Sedangkan dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah, “Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya)”.(1995:250)

Pengertian efisiensi itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, diantara adalah pengertian Efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu, “Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”.(1994 ; 07)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu

dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

2. Efektifitas

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya.

Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Menurut Chester I. Barnard dalam Prawirosentono, (1999:27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

“When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not”.

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang

dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak). Sedangkan pendapat yang hampir senada juga di lontarkan Peter Drucker dalam Kisdarto, (2002 : 139), menyatakan :

“doing the right things is more important than doing the things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa: *“effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right”* (efektifitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau *“effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly”* (efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber juga daya secara cermat).

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya.

3. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program

Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen

Dalam Negeri, 2002:18).

Sedangkan Gambir Bhata dalam Sedarmayanti (2004:6) menjelaskan bahwa:

- a) **Transparansi (transparency)** : Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi
- b) **Efektifitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency)** : Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya sebagai sumber yang tersedia

Sedangkan arti transparansi dalam jurnal Hafiz Tanjung adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).

jadi dapat disimpulkan jika Transparansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pihak pemerintah di dalam upaya memberikan informasi tentang keuangan pihak pemerintah, kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam keuangan pihak pemerintahan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran

Jadi pada dasarnya transparansi, efektifitas, dan efisiensi adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah program kerja yang mana ketiga faktor ini adalah faktor yang menentukan, untuk bisa atau tidaknya program tersebut berjalan atau tidak, dan dapat mencapai tujuan atau tidak.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu pengembangan dari pada konsep pembangunan. Menurut Suryono (2010:262) mengemukakan arti konsep pemberdayaan yaitu suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang kurang akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus di dorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan peri kehidupan mereka.

Sedangkan Menurut Prijono dan Pranarka dalam Suryono (2010:261) kata *empower* memiliki dua arti pokok, yaitu: (1) *to give power or authority to*, diartikan sebagai member kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, dan (2) *to give ability to or enable*, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan jika konsep dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah suatu kemampuan dari dalam diri masyarakat itu sendiri untuk bergerak dari suatu posisi yang diam menuju kearah perubahan, rasa ini timbul karena ingin adanya perubahan, dan dilakukan dengan kesadaran sendiri. Keberdayaan masyarakat biasanya dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri dan mencapai perbaikan di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Peran pemerintah di sini sebagai pemberi kewenangan atau kemampuan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut mampu untuk untuk menuju ke arah keberdayaan.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Memberdayakan Masyarakat

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat para aktor pemberdaya masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip agar pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai secara optimal, Prinsip-prinsip pemberdayaan Masyarakat Dalam Suryono (2010:263-264), Yaitu

1. Datangi dan dekati masyarakat yang hendak di berdayakan (*Go to People*)
2. Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya (*live among the people*)
3. Belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki (*learn form the people*)
4. Ajak dan ikutkan masyarakat dalam proses perencanaan (*plan with the people*)
5. Ajak dan libatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan rencana (*work with the People*)
6. Mulailah dari apa yang telah masyarakat tahu dan pahami (*Start with what people know*)
7. Bangunlah sesuatu dari sumber kemampuan dan modal yang masyarakat miliki (*Build on what the people have*)
8. Ajarilah masyarakat dengan contoh-contoh yang jelas dan dapat dilaksanakan (*Teach by showing, learn by doing*)
9. Jangan dipameri mereka dengan sesuatu yang menyilaukan, tetapi berikanlah mereka sesuatu pola yang realistic (*Not a showcase, but a pattern*)
10. Jangan tunjukkan pada mereka sesuatu yang pesimistik sebagai akhir dari segalanya, tetapi berikanlah kepada mereka suatu sistem yang optimis, baik dan benar (*Not odds and ends, but a sistem*)
11. Jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-potong (parsial), tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu (*Not piecemeal, but integrated approach*)
12. Bukan penyesuaian cara, model atau bentuknya, tetapi transformasi dari cara, model dan bentuknya (*not to conform, but to transform*)
13. Jangan memberikan penyelesaian akhir pada mereka, tetapi berilah kebebasan pada mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri (*Not relief, but release*)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan jika dalam upaya pemenuhan dan tercapainya pemberdayaan masyarakat secara optimal maka aktor-aktor yang

membuat pemberdayaan masyarakat haruslah memperhatikan ketigabelas prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaannya.

3. Aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga terlibat peran dari para aktor-aktor tersebut. Sulistiyani (2004) merancang peran ketiga aktor tersebut dalam table berikut ini:

Tabel 1
Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran
Pemerintah	Formulasi dan penetapan kebijakan , implementasi, monitoring dan evaluasi serta mediasi	Berbagai macam kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, penetapan indikator, pembuatan juklak, penyelesaian sengketa
Swasta	Kontibusi pada formulasi , implementasi , monitoring , dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan pemeliharaan
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi , implementasi , monitoring , dan evaluasi	Saran, kritik, input, partisipasi, menghidupkan fungsi sosial control, menjadi obyek

Sumber : Sulistiyani (2004:97)

Dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan jika di dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak hanya pihak pemerintah saja yang memegang peran penting di dalam pemberdayaan yang bertindak selaku pembuat kebijakan,

akan tetapi semua pihak di dalamnya termasuk pihak swasta sebagai pihak evaluasi dari kebijakan, dan juga pihak masyarakat sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut. Jika ketiga aktor ini kurang berperan atau tidak berperan maka akan membuat pemberdayaan tersebut akan terkendala ataupun kurang berjalan sebagaimana mustinya.

4. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat juga mengandung resiko kegagalan. Prasoyo (2004:11) menyebutkan terdapat enam permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yakni:

1. Diskontinuitas dan diskoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara *sporadic*. kebijakan pemerintah malah berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan LSM.
2. Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tertentu.
3. Disorientasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Banyaknya masalah baru yang muncul, disertai oleh hasil yang belum tampak nyata terkadang menjadikan fasilitator (pendamping) baik dari pemerintah maupun LSM mengubah kebijakan yang lebih nyata.
4. Generalisasi yaitu deferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai. Dengan kondisi yang majemuk tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya pembangunan yang tak bersifat monolitik, namun harus bersifat dinamis dengan memperhatikan nilai-nilai dasar di masyarakat, karakter budaya serta struktur sosial masyarakat.
5. Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum dan undang-undang pembangunan dan pemberdayaan yang bersifat kaku yang hanya didasarkan pada surat keputusan (SK), petunjuk pelaksanaan (juklak), Petunjuk teknis (juknis) juga sistem penganggaran. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas lapangan berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan

fleksibilitas. Akibatnya tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada peraturan daripada menjawab kebutuhan lapangan.

6. Indikator yang tidak tepat, pemberdayaan masyarakat selama ini diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses. Kesadaran akan nilai, hukum ataupun partisipasi politik masyarakat terkadang tidak dapat diabaikan.

F. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Sebagai makhluk sosial manusia diharapkan saling berhubungan baik dengan sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong menolong, saling bekerja sama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Hal itu juga berlaku untuk melakukan tugas kehidupan dan pembangunan bangsa, manusia juga dituntut agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tersebut. Pernyataan peneliti ini mengisyaratkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat adalah suatu unsur di dalam pembangunan. Menurut Davis dalam Sastropetro, (1998:13) partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencari tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Sedangkan PBB dalam Slamet, (1994:3) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan atau peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Sementara Khadiyanto (2007:31)

merumuskan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau peran serta masyarakat secara mental, fisik, maupun pikiran dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan serta ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan dan berani menanggung resiko tentang apa yang terjadi. Tujuan dasar dari partisipasi atau peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan evaluasi adalah untuk menghasilkan masukan dan presepsi yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka pembangunan nasional yang lebih menitik beratkan pada partisipasi masyarakat di dalam suatu program pembangunan yang secara tidak langsung akan membuat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat apa yang sudah mereka bangun.

2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka penyelenggaraan pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal. Secara umum, masyarakat diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban, lebih terinformasi, memiliki solidaritas atas sesama, bersedia

berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, dan tidak mementingkan diri sendiri (Sumarto,2003:11). Sedangkan menurut Conyers dalam Huraerah,(2008:105) pada umumnya masyarakat enggan berpartisipasi bila mereka merasa bahwa partisipasi mereka hanya sedikit mempengaruhi atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali pada apa yang terjadi. Lebih lanjut Conyers dalam Huraerah, (2008:105) mengemukakan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat,yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi, kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program serta proyek pembangunan gagal.
- b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program serta proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka merasa akan lebih mngetahui seluk beluk proyek tersebut.
- c. Adanya anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

Definisi diatas mengandung arti setiap partisipasi masyarakat akan mendapatkan informasi, keadilan, atau kondisi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam setiap program pembangunan, tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka suatu program tidak akan berjalan dengan baik.

Sementara Sastropoetro (1998:13) mengemukakan ada tiga faktor penting dalam partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan jasmaniah.
- b. Kesadaran untuk memberikan sumbangan kepada usaha yang mempunyai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok
- c. Ada unsur tanggung jawab dan perasaan turut memiliki (*sense of belonging*)

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan selama ini hanya dilihat dalam konteks yang sempit bahkan hanya dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Kondisi seperti ini mengakibatkan peran serta masyarakat terbatas hanya pada implementasi atau penerapan program saja, masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif jadi mereka harus menerima keputusan yang sudah ditentukan pihak luar baik itu pemerintah ataupun bukan lembaga pemerintah.

3. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi juga memiliki bentuk di dalam proses pelaksanaannya, Menurut Ndraha dalam Suryono (2010: 256-257), antara lain:

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyahkan, menerima dengan syarat, merespon dan dalam arti menolaknya
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan dan penetapan rencana.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan

- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefits*".
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Rusidi dalam Siregar, (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi antara lain :

- a. Sumbangan pikiran (idea atau gagasan)
- b. Sumbangan materi (dana barang dan alat)
- c. Sumbangan tenaga (bekerja atau member kerja)
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Hal yang hampir serupa juga dikatakan Cohen dan Uphoff dalam Syamsi (1994:114) yang membedakan empat jenis partisipasi, antara lain :

- a. Partisipasi dalam perencanaan
Partisipasi ini merupakan keterlibatan orang-orang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
- c. Partisipasi dalam mengambil manfaat
Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Partisipasi dalam evaluasi
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan jika partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sesungguhnya dapat diartikan juga pada proses pengambilan keputusan hingga pada proses evaluasi dan pengendalian program.

Selain itu partisipasi atau peran serta masyarakat juga dapat dilihat pada proses pemanfaatan dari program pembangunan tersebut. Sedangkan bentuk pada partisipasi itu sendiri lebih mengarah pada proses awal mulai penyerapan informasi dari masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, penerimaan, dan juga sampai pada tahapan penilaian pada hasil pembangunan tersebut.

4. Metode Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Dalam partisipasi masyarakat terdapat metode atau cara-cara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Menurut Suryono (2010:257) membagi metode sebagai berikut:

- a. Disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat
- b. Dijadikan stimulasi terhadap penyadaran masyarakat untuk membangun, dan berfungsi sekaligus bagi timbulnya tanggapan yang dikehendaki bersama
- c. Dijadikan langkah motivasi bagi masyarakat, yang berfungsi untuk membangkitkan perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, praktek kerja dan status kehidupan mereka secara berlanjut.
- d. Proyek pembangunan yang dirancang sedemikian rupa secara sederhana, mudah dikelola, dan dilaksanakan oleh masyarakat
- e. Adanya dukungan organisasi dan kelembagaan masyarakat yang mampu mengerahkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara terbuka dan independen.
- f. Adanya peningkatan peranan masyarakat di dalam pembangunan secara aktif.
- g. Partisipasi itu harus memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang bersangkutan
- h. Dalam proses partisipasi tersebut menjamin adanya pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama keterlibatan mereka dalam proses monitoring, evaluasi dan dalam pengambilan keputusan secara perwakilan atau representative
- i. Perlu disadari dalam partisipasi masyarakat berlaku prinsip teori pertukaran dasar (*Basic Exchange Theory*) yakni, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Denzin dan Lincoln dalam Moleong, (2006:5). Sedangkan Menurut Subana (2005:89)

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk melihat, menafsirkan serta mendeskripsikan mengenai fakta-fakta, variable-variable yang berada di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Sebuah penelitian tidaklah terlepas dari fokus penelitian, fokus penelitian bertujuan untuk membatasi bidang kajian penelitian yang mana agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah di Kelurahan

Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang meliputi :

a. Implementasi Prinsip Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah

1) Efektifitas

2) Efisiensi

3) Transparansi

b. Tercapainya tujuan dana hibah yaitu:

1) Pemberdayaan masyarakat kelurahan

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat

a) Proses Perencanaan Pembangunan

b) Pelaksanaan Pembangunan

c) Pemeliharaan pembangunan

2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi pengelolaan

Dana Hibah kepada masyarakat kelurahan Ciptomulyo, meliputi

a. Internal : Masyarakat kelurahan Ciptomulyo

b. Eksternal : Cuaca atau kondisi Alam

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian sedangkan

situs penelitian adalah letak dimana peneliti melakukan penelitian secara benar

agar mendapatkan data yang benar-benar akurat, terpercaya dan dapat

dipertanggung jawabkan. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kota

Malang, sedangkan situsnya terdapat pada Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan

sukun Kota Malang dan tempat pelaksanaannya Dana Hibah.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah unsur yang paling penting dalam suatu penelitian karena digunakan sebagai bahan untuk pengumpulan data dan juga penafsiran data ataupun untuk penarikan kesimpulan. Menurut Arikunto (2002:107), sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana saja data dapat diperoleh. Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang atau yang dapat dijadikan narasumber data karena lebih dianggap menguasai bidang permasalahan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*)

2. Data Skunder

Adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Berarti data ini tidak secara langsung berhubungan dengan responden, data skunder meliputi : dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan, dan laporan yang resmi yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-dat yang diperlukan oleh seorang peneliti, dalam penelitian ini, teknik penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 2002:152)

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar mendapatkan data secara akurat dan maksimal. Di dalam hal ini wawancara yang peneliti lakukan di tujukan kepada narasumber yang terkait di dalam program Dana Hibah yaitu Bapak Ir, Wahyudi Sudiono selaku lurah Ciptomulyo, Ibu lilies selaku bagian keuangan kelurahan Ciptomulyo, dan juga para warga yang secara langsung maupun tak langsung ikut di dalam program tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan ataupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 1999). Teknik observasi non-partisipan, yakni peneliti tidak melibatkan diri dalam lingkungan yang sedang diteliti sehingga tidak mempengaruhi objek amatan tersebut, sehingga peneliti sebagai pengumpul data saja.

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang meliputi dokumen atau arsip-arsip yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen-dokumen dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau berbagai artikel dari majalah-majalah, Koran atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari rencana definitive keuangan kelurahan Ciptomulyo tahun 2011 dan foto-foto pelaksanaan program Dana Hibah

F. Analisis Data

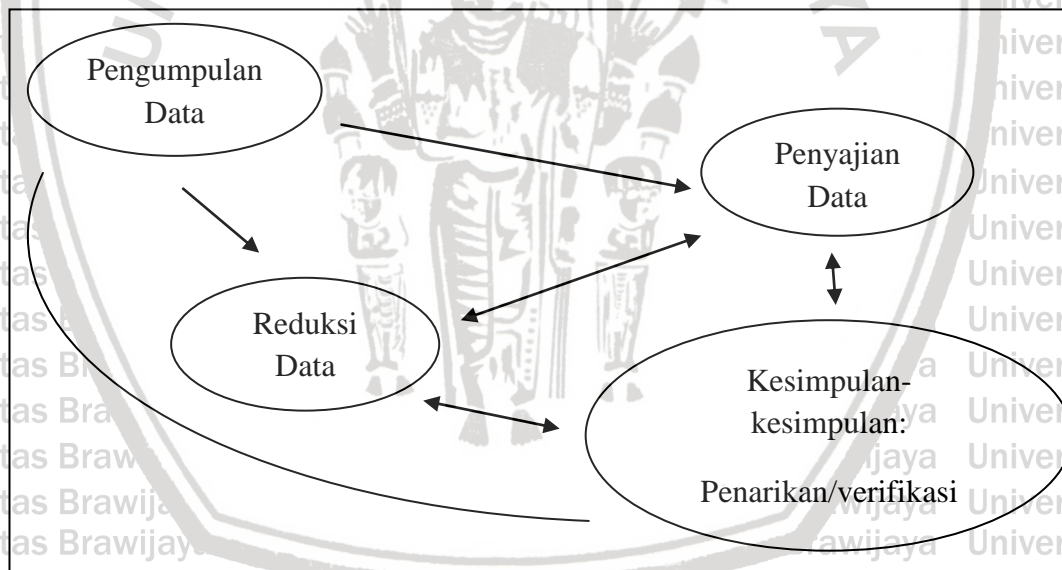
Menurut Milles dan Huberman (1992:16) langkah-langkah analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana diketahui, reduksi data, berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang apa yang tidak perlu, dan mengkoordinasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi

2. Penyajian Data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada penelitian berbentuk kualitatif adalah teks berbentuk naratif
3. Penarikan Kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dari penelitian, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Gambar 4

Komponen-komponen Analisis Data



Sumber: Milles and Huberman (1992)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang

Kelurahan Ciptomulyo terletak di Jl.Kolonel Sugiono gang VIII Kecamatan Sukun Kota Malang. Kelurahan Ciptomulyo terdiri dari 62 RT dan 5 RW, pada tahun 2011 jumlah penduduk Kelurahan Ciptomulyo tercatat 16.589 jiwa, yaitu jumlah laki-laki 8803 jiwa, dan perempuan 7786 jiwa dengan uraian sebagai berikut :

a. Mata Pencaharian

Sementara itu, untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat Kelurahan Ciptomulyo dalam memenuhi kebutuhannya dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang ditekuninya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kelurahan Ciptomulyo memiliki mata pencaharian yang beragam. Untuk lebih rincinya mengenai struktur mata pencaharian penduduk Kelurahan Ciptomulyo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2011

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Prosentase
1	2	3	4
1	Petani	6	0,14%
2	Pedagang	2621	64,16%
3	Pengrajin/industri kecil	6	0,14%
4	Buruh indutri	570	13,95%

1	2	3	4
5	Buruh bangunan	129	3,15%
6	Pegawai negeri sipil (PNS)	345	8,44%
7	Anggota TNI	145	3,54%
8	Pensiunan PNS/TNI	261	6,38%
9	Peternak	2	0,48%
	Jumlah	4085	100%

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jika sebagian besar masyarakat ciptomulyo berprofesi sebagai pedagang dengan prosentase sebanyak 64,16%, sedangkan pada posisi kedua sebesar 13,95% adalah buruh industri di karenakan terdapat banyak industri dan pabrik di daerah ciptomulyo, sementara yang paling bawah adalah profesi peternak dengan prosentase sebesar 0,48%

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Ciptomulyo sudah cukup tinggi, karena masyarakat Kelurahan Ciptomulyo yang lulus atau tamat dari tingkatan SLTP sudah cukup banyak, hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	2	3	4
1	Belum Sekolah	320	2,75%
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	340	2,96%
3	Tamat SD/ sederajat	3170	27,68%

1	2	3	4
4	Tamat SLTP/ sederajat	3812	33,92%
5	Tamat SMU/ sederajat	3300	28,82%
6	Tamat Akademik/ sederajat	79	0,68%
7	Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	275	2,40%
8	Pasca Sarjana	6	0,05%
9	Pendidikan Khusus	148	1,29%
	Jumlah	11450	100%

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi pendidikan masyarakat Kelurahan Ciptomulyo setingkat SLTP dengan angka prosentase yang paling tinggi yaitu 33,29%, berpendidikan setingkat SLTA 28,82%, berpendidikan setingkat SD 27,68 %. Namun hal lain yang perlu diperhatikan yaitu masih ada sebagian masyarakat Kelurahan Ciptomulyo yang belum merasakan bangku pendidikan antara lain dengan kategori yang belum sekolah ada 2,75%, tidak tamat Sekolah Dasar 2,96%, akan tetapi di daerah ciptomulyo terdapat sekitar 1,29% yang mana mereka mengenyam pendidikan dari pendidikan di luar sekolah seperti pondok pesantren maupun tempat kursus . Dengan adanya masyarakat Kelurahan Ciptomulyo yang masih memerlukan pendidikan, hendaknya perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera nantinya.

c. Kehidupan Beragama

Kebebasan memilih dan memeluk agama merupakan hak asasi warga Negara Indonesia, namun demikian sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 UUD 1945, yaitu setiap warga Negara diharuskan untuk menganut salah satu agama dan kepercayaan yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Berikut akan ditunjukkan tabel mengenai jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan.

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Menurut Agama Tahun 2011

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	14440	87%
2	Khatolik	1258	7,5%
3	Protestan	651	4%
4	Hindu	138	0,83%
5	Budha	102	0,62%
	JUMLAH	16589	100 %

Sumber : Dokumen Monografi Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui jika mayoritas warga ciptomulyo adalah beragama islam dengan prosentase 87%, diposisi kedua agama Khatolik dengan 7,5%, sementara yang paling bawah adalah agama Budha dengan 0,62%

d. Visi dan Misi Kelurahan Ciptomulyo

Visi

Mewujudkan Kelurahan sebagai pelopor pelayan masyarakat terbaik dan bertanggungjawab.

Misi

Penegakan hukum, penyediaan data yang akurat, pelayanan yang efisien dan bertanggungjawab, penetapan prosedur pelayanan, fasilitasi bantuan modal dan pemasaran produk, fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan.

e. Tujuan dan Sasaran

- a) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundangan.
- b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan pelayanan yang efisien.
- c) penyiapan data pendukung perencanaan pembangunan yang akurat.
- d) fasilitasi bantuan modal dan pemasaran produk bagi ekonomi lemah.
- e) bantuan sarana prasarana peningkatan kualitas lingkungan.

f. Fungsi Kebijakan

- a) melaksanakan tugas pelayanan pemerintah Kota di tingkat Kecamatan.
- b) menyelenggarakan dukungan koordinasi perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- c) menyelenggarakan dukungan pelayanan perangkat daerah di tingkat Kecamatan.

d) menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan sosial.

e) membina pemerintahan Kelurahan.

f) Menyusun Program, Pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

g) melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan walikota.

g. Batas Wilayah

Utara : Kelurahan Sukoharjo (Klojen)

Timur : Kelurahan Bandung Rejosari (Sukun)

Barat : Mergosono

Selatan : Kelurahan Gadang (Sukun)

h. Geografis

Luas wilayah : 193,20 Hektar

Dataran tinggi dan permukaan laut : 450 m

Suhu max/min 23° C s/d 30 ° C

Curah hujan rata-rata 1210 mm/th

2. Dana hibah

a. Dasar Terbentuknya dana hibah

Dana hibah ada dan terbentuk karena otonomi daerah yang mana dana hibah ini menjadi satu program unggulan di kota malang dan tidak ada di daerah lain.

Dana hibah sendiri sudah ada sejak tahun 2009 akan tetapi pada awal tahun 2012

nama dana hibah sudah digantikan menjadi program pemberdayaan masyarakat

yang mana program ini pada dasarnya bertujuan sama untuk mensejahterakan masyarakat pada tingkat yang paling dasar di dalam pemerintahan yaitu tingkat kelurahan.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ibu lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

“dana hibah pertama kali muncul pada tahun 2009 akan tetapi pada tahun 2012 berubah namanya menjadi program pemberdayaan, munculnya dana hibah dikota malang menjadi primadona karena keunikannya yang tidak terdapat di daerah lain, sering kali banyak kunjungan kerja dari daerah lain yang mana bertujuan untuk mengetahui dana hibah itu sendiri dikota malang, dasar dari dana hibah itu sendiri adalah untuk pemerataan pembangunan sampai pada wilayah terkecil yaitu kelurahan yang mana dana tersebut bisa digunakan sebagai sarana pembangunan jalan-jalan ataupun segala kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kelurahan” (wawancara, 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

b. Mekanisme dana hibah

Setiap pembentukan suatu program pemerintah pasti akan selalu berdasarkan pada pedoman maupun undang-undang yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam dana hibah undang-undang yang menjadi dasarnya adalah Peraturan walikota malang no.10 tahun 2010 tentang dana hibah yang mengatur mulai dasar dan garis besar dana hibah dan mengatur bagaimana dana hibah itu dilaksanakan dan bagaimana dana hibah tersebut berjalan. Selain peraturan walikota dana hibah juga diatur dalam pelaksanaannya dalam PTO (Petunjuk teknis operasional) yang mana menitikberatkan pada petunjuk pelaksanaan dana hibah. Mulai dari awal perumusan dana hibah sampai pada pengaturan atau pengawasan pelaksanaan dana hibah, jadi secara tidak langsung PTO adalah penjelasan dari PERWAL no.10 tahun 2010.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Yudi selaku lurah ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

“dana hibah adalah suatu program kota malang yang memiliki aturan di dalamnya, bukan hanya PERWAL no.10 saja akan tetapi hampir tiap tahun ada peraturan dan ada perubahan di dalam aturan-aturan di dalamnya,yang di latar belakang oleh aturan-atauran KEMENDAGRI baru, secara tidak langsung akan membuat program dana hibah ini akan menjadi lebih baik dan terarah di bidang peng –administrasiannya,seperti adanya perubahan nama dana hibah dan berbagai macam aturan di dalamnya sejak tahun 2012”(wawancara 18 desember 2012 pukul 11.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Hal ini juga senada dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan kantor kelurahan ciptomulyo sebagai berikut:

“Dana hibah adalah program yang tercipta tahun 2009 yang mana di dalamnya berisi aturan-aturan yang berguna untuk mengatur dana hibah, yang mana dalam berjalannya dana hibah ini terjadi sutu perubahan yang mana sejak tahun 2012 ini demi memperbaiki pengadministrasiannya dana hibah dirubah namanya menjadi program pemberdayaan masyarakat, yang lebih menitik beratkana pada perubahan kelurahan menjadi suatu SKPD”(wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Pelaksanaan dana hibah sendiri sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, meskipun dalam perjalanannya program tersebut sampai saat ini perlu dilakukan pembenahan dalam bidang tatacara dan pembenahan administrative yang harus di sesuaikan dengan perundang-undangan yang terus diperbaharui guna program tersebut dapat dikatakan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

“program dana hibah di awal tahun 2012 ini pada dasarnya mengalami perubahan dalam hal perundang-undangannya, yang mana pada saat ini lembaga yang memegang keuangan penuh adalah kelurahan langsung, dimana dalam perubahannya kelurahan menjadi SKPD atau satuan kerja perangkat daerah. Kalau nama sendiri sebenarnya sudah berubah

akan tetapi karena masih banyak masyarakat yang familiar dengan dana hibah maka nama dana hibah masih kami pakai. (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Pelaksanaan Dana Hibah di Kelurahan Ciptomulyo

a. Implementasi Prinsip Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah

a) Prinsip efektifitas Ditambahkan dengan analisis model implementasi dan Pengelolaan dan Penggunaan

Prinsip efektifitas dalam dana hibah, diindikasikan prinsip ini terkait dalam hal bagaimana dana hibah menjadi sangat efektif guna dalam pemenuhan kebutuhan, yang dimaksud disini adalah pemenuhan kebutuhan berupa dana dalam upaya penerapan suatu keputusan atas program apa yang akan di laksanakan, yang sudah disepakati bersama dalam MUSREMBANGKEL. Dalam jalannya anggaran belanja dapat dikatakan tidak ada sisa dalam keuangan pasca penggunaan dana hibah karena dalam pelaksanaannya dana hibah selalu dilampirkan dengan rencana belanja yang mana kemungkinan kecil akan adanya sisa anggaran belanja.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

“dalam dana hibah untuk pelaksanaan atau penerapan prinsip efektifitas sudah terlaksana hal ini dapat dilihat dan ditinjau dari setiap pelaksanaan program di bidang pencairan dana dalam upaya pelaksanaan program yang dilakukan pihak kelurahan.”(wawancara

19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo

b) Efisiensi

Sedangkan prinsip efisiensi yang dapat peneliti simpulkan adalah dana yang dikeluarkan dalam dana hibah dapat terserap sesuai dengan apa yang sudah di anggarkan dan diputuskan bersama dalam MUSREMBANGKEL.

Hal ini sesuai dengan perkataan bu lilies selaku bagian keuangan kelurahan ciptomulyo,

“Prinsip efisiensi dapat dikatakan sudah terlaksana dalam dana hibah, hal ini ditandai dengan, keterserapan jumlah dana ke dalam program yang dimaksudkan sudah sangat tinggi, jadi dapat dikatakan hampir tidak ada program yang gagal atau tidak berjalan” (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

c) Transparansi

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana hibah sendiri dapat dikatakan sudah menerapkan prinsip transparansi hal ini dapat ditandai dengan uang yang di dapat dari dana hibah langsung dituangkan dalam SPK(surat perintah keuangan) dalam hal ini yang mengeluarkan adalah POKMAS, yang merupakan suatu lembaga masyarakat sekitar dari kelurahan yang dapat dikatakan terbentuk dari peran serta warga sekitar.

Pokmas disini dapat menjadi juga suatu badan yang berperan serta dalam pengawasan program Dana Hibah itu sendiri, karena Pokmas atau lembaga lain seperti LSM yang mengetahui ada kecurangan atau ada kejanggalan dalam proyek tersebut dapat dilaporkan pada tim monitoring Dana Hibah.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis

selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

"Prinsip transparansi dalam program dana hibah sejak pertama kali terbentuk sudah ada, yang mana dalam hal ini prinsip transparansi dana hibah ditunjukkan dalam SPK atau Surat Perintah Keuangan, dan juga sudah dapat dilihat dan diumumkan biasanya di dalam rapat RT atau RW dimana kegunaan pembangunan tersebut dijalankan" (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

b. Tercapainya tujuan dana hibah

a) Pemberdayaan masyarakat

Adapun berbagai hasil yang sudah dicapai dalam program dana hibah baik dalam bentuk fisik dan non fisik di kelurahan ciptomulyo dapat dikatakan beragam, seperti, pembangunan jalan desa atau pavingisasi, penghijauan, pembenahan gorong-gorong, pemberdayaan perempuan, pelebaran jalan, Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

"dalam pelaksanaan dana hibah sudah banyak program pemberdayaan masyarakat yang terlaksanan, seperti pelebaran jalan, pemberdayaan perempuan berupa pelatihan-pelatihan, selain itu pavingisasi, penghijauan, pembenahan gorong-gorong, perbaikan jalan" (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

b) Partisipasi masyarakat

1) Perencanaan Pembangunan dana hibah

Dana hibah sendiri adalah suatu program yang didasari dari tingkat MUSREMBANGKEL yang mana dalam MUSREMBANGKEL ini pihak kelurahan berperan aktif dan dibantu oleh pihak LPMK yang mana pihak LPMK adalah partner dari pihak kelurahan yang bersama-sama ikut terlibat dan mengawasi dana hibah selain dari pihak kecamatan sendiri yang langsung bergerak dan turun tangan. Dalam MUSREMBANGKEL pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya dari pihak kelurahan saja akan tetapi dari pihak LSM maupun tokoh-tokoh masyarakat seperti para pemangku adat ataupun tokoh agama yang ada di daerah tersebut, dari pihak warga sendiri dari satu RW diwakili oleh sekitar 10 orang yang mana perwakilan ini berasal dari gabungan pegawai struktural RW dan juga warga sekitar. Hasil MUSREMBANGKEL di gambarkan dalam skala prioritas yang akan menjadi acuan penetapan program pelaksanaan dana hibah.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan dana hibah proses yang paling mendasar adalah MUSREMBANGKEL, yang mana proses ini adalah proses awal dari dana hibah dari proses ini dapat dibuat suatu skala prioritas yang mana dalam skala ini akan membuat mana hal yang bersifat urgen atau mendesak sampai pada hal yang bersifat tak mendesak. Dalam MUSREMBANGKEL untuk membuat semua keputusan dapat disepakati bersama maka tidak hanya dari pihak kelurahan saja yang terlibat akan tetapi dari pihak LSM, LPMK, dan juga para tokoh-tokoh

agama sekitar, dari pihak warga sendiri diwakilkan per RW yang mana tiap RW bisa mewakilkan 10 orang lebih yang notabennya kombinasi dari struktural RW dan juga warga sekitar”(wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Dalam Pelaksanaan dana hibah peran LPMK (lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan) sebagai mitra daripada kelurahan yang mana LPMK sendiri adalah suatu lembaga yang ikut serta dalam hal perencanaan sampai pada hal pengawasan program dana hibah tersebut, anggota dari LPMK sendiri dari masyarakat sekitar bahkan bisa berasal daripada pejabat daerah setempat yaitu ketua RT atau RW, ataupun anggota dari kantor RT maupun RW.

2) Pelaksanaan pembangunan

Dana hibah ini sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai program yang benar-benar melibatkan masyarakat dalam angka yang cukup besar yang mana dalam hal ini seperti sudah dijelaskan diatas bahwa masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, selain itu dalam proses pelaksanaan dan pengawasan sangat dibutuhkan peran serta masyarakat yang sangat tinggi juga. Dalam hal pelaksanaan masyarakat dapat diikuti sertakan misalnya dalam program fisik ,masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pekerja bangunan akan dilibatkan jadi dengan kata lain agar masyarakat didaerah sekitar merasakan dampak dari adanya program ini secara langsung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Giono warga RW 1

“awalnya saya kurang mengerti dengan dana hibah itu sendiri apa?, akan tetapi saya merasakan dampaknya secara langsung dengan dilibatkannya saya dalam proses pembangunan gorong-gorong dan pelebaran jalan ini, saya sangat senang sekali,selain mendapatkan uang untuk pekerjaan saya, saya juga merasa ikut berperan serta

dalam program ini, selain itu ya ini namanya juga fasilitas umum, ya nantinya saya juga yang bakalan memakainya dan akan ikut serta merawatnya (wawancara 24 desember 2012 pukul 13.00 WIB, di depan Balai Pertemuan Kelurahan)

Hal yang sama diutarakan oleh ibu lilies selaku bagian keuangan kelurahan ciptomulyo

“dalam pelaksanaan program dana hibah ini kami selalu melibatkan warga sekitar, semisal untuk pelaksanaan program yang mengarah kepada pembangunan fisik kita lebih memprioritaskan pada tenaga kerja yang bersifat dari kelurahan sendiri, selain itu dalam perencanaan kami selalu disertai dengan tenaga ahli kalau bisa juga dari kelurahan sini, seperti arsitek, yang merancang bangun suatu bangunan, dalam hal pengawasan sendiri yang menjadi anggota dari LSM atau LPMK, sendiri adalah warga asli dari pada kelurahan ini sendiri. (wawancara tanggal 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Dalam perjalanan pelaksanaan program dana hibah itu sendiri masyarakat jikalau ada kekurangan dari faktor yang tidak terbayangkan di dalam pelaksanaan dana hibah itu sendiri maka secara tak langsung, masyarakat akan bersama-sama menggalang dana yang di sebut dana swadaya, atau dana bantuan pembangunan, Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan ibu lilies selaku bagian keuangan ciptomulyo.

“dalam program dana hibah jikalau terjadi kekurangan dana dalam hal pelaksanaannya maka masyarakat sekitar bisa melakukan bantuan dana yang disebut dengan dana swadaya, biasanya terjadinya kekurangan dana karena adanya faktor-faktor diluar perkiraan, seperti cuaca yang mengakibatkan molornya pekerjaan, ataupun harga barang- barang yang dipakai, atau juga harga atau ongkos dari para pekerja, yang taka tentu dan berbeda satu sama lain. Selain itu dana swadaya sendiri memang sudah ada yang nantinya dana ini akan di estimasikan dengan kekurangan dana dari yang sudah diperkirakan” (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Gambar. 2



Foto pembangunan 75% drainase di kelurahan ciptomulyo

Gambar. 3



Foto pelebaran jalan dan drainase 100% di kelurahan ciptomulyo

Gambar. 4



Foto pembinaan kader PKK kelurahan Ciptomulyo

3) Pemeliharaan pembangunan

Pada proses pemeliharaan pembangunan dapat dikatakan masyarakat memelihara hasil pembangunan karena secara tidak langsung masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi di dalam proses pembangunan tersebut dari awal. Adapun hal-hal yang digunakan untuk ikut memelihara hasil pembangunan mungkin serta dan aktif menjaga kebersihan hasil pembangunan tersebut, Hal ini senada dengan apa yang dikatakan ibu lilies selaku bagian keuangan Ciptomulyo, yaitu

“ dilibatkannya masyarakat dalam program ini agar nantinya masyarakat juga dapat merasakan arti yang penting dari bangunan fisik apa yang mereka hasilkan, jadi agar masyarakat sendiri dapat menyayangnya, dan memeliharanya dengan cara ikut menjaga dan merawat kebersihan hasil pembangunan saja sudah cukup kok. (wawancara tanggal 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB. di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Hal serupa juga dikatakan salah satu warga RW 2 kelurahan ciptomulyo,yaitu

“hasil-hasil dari pembangunan dana hibah itu sendiri sangat banyak ,kami merasa senang karena kami dilibatkan dalam banyak proses pembangunan tersebut, sementara untuk menjaganya, kami warga sekitar ikut juga menjaga kebersihan bangunan-bangunan hasil dari program tersebut, semisal dari gorong-gorong, kami melakukan kerja bakti minimal satu bulan sekali , atau warga yang di depan rumahnya terdapat gorong-gorong akan sukarela, membersihkannya dari kotoran-kotoran yang dapat menyumbat pembuangan air tersebut”(wawancara tanggal 25 desember 2012,pukul 15.00 WIB,di sekitar kelurahan ciptomulyo)

2. Faktor Implementasi dana Hibah

a. Internal

Dalam pelaksanaan suatu program pasti selalu ada faktor-faktor yang mendukung dari program tersebut akan tetapi dapat dibagi lagi di dalam faktor internal dan eksternal daripada terciptanya atau terlaksananya pelaksanaan program tersebut,dalam pelaksanaan dana hibah sendiri dapat dikatakan ada berbagai faktor internal dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun faktor internalnya dapat dikatakan dari faktor masyarakat sendiri yang mana masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya,dan juga dalam proses perumusan serta peran serta berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut seperti LPMK, Kelurahan, dan juga masyarakat yang bekerja di dalam pelaksanaannya. Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

“dalam pelaksanaan dana hibah faktor internal dari pelaksanaan program dana hibah yang paling utama adalah masyarakat yang terlibat

di dalamnya mulai dari masa perencanaan sampai masa pelaksanaan serta pengawasan, yang mana juga akan melibatkan tingkat kerjasama yang tinggi antara masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan program tersebut seperti LSM, LPMK dan tentunya pihak kelurahan terkait, jika nanti terdapat hambatan dari masyarakat kami dapat melakukan upaya seperti pendekatan yang intens dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, dengan pendekatan ini kami nanti berharap masyarakat yang pola pikirnya masih tertutup dapat secara perlahan mengerti bagaimana pentingnya program ini. (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Hal senada juga di sampaikan oleh salah seorang warga Ciptomulyo "menurut saya sebagai warga kelurahan ciptomulyo, pada dasarnya mungkin yang menjadi factor pendukung dari dalam pelaksanaan dana hibah itu sendiri adalah masyarakat, karena sejauh saya ikut dalam proses perumusan sampai pelaksanaan, jika dukungan dari warga penuh dan tidak ada complain dari warga, tentu program tersebut akan berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. (wawancara pada 23 desember 2012 pukul 11.00 WIB, di seputaran jalan kelurahan ciptomulyo)

b. Eksternal

Sedangkan faktor eksternalnya bisa di ringkas dari kondisi alam dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan atau dilakukan, selain itu adanya kenaikan di dalam jumlah anggaran yang di perkirakan . Solusinya adalah adanya kemauan warga yang secara bersama-sama untuk menghimpun dana dalam upaya membentuk dana swadaya yang mana dana ini biasanya dapat digunakan jika dalam proses pelaksanaan pembangunan mengalami kekurangan dana.

Penjelasan berikut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo yaitu sebagai berikut:

".....Sedangkan dalam faktor eksternal yang paling utama adalah dari kendala cuaca atau kondisi alam dimana program ini dilaksanakan hal ini berkaitan dalam pembangunan fisik yang mana jika kita melaksanakan suatu program seperti pembangunan sarana gorong-gorong jika cuaca atau faktor alam kurang mendukung maka akan membuat pelaksanaan program tersebut akan terkendala juga nantinya.Selain itu secara tidak langsung ada di

beberapa RW yang mana mereka secara sukarela dan sadar melakukan pengumpulan dana atau biasanya disebut dana swadaya yang mana nantinya akan digunakan jika adanya kekurangan dana dalam pelaksanaan pembangunan fisik di daerahnya.” (wawancara 19 desember 2012 pukul 14.00 WIB, di Kantor Kelurahan Ciptomulyo)

Senada dengan pernyataan diatas bapak Giono selaku warga kelurahan ciptomulyo menambahkan, jika,

“ kalau ditanya faktor/ hal yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan ini tersendat ya, yang paling utama adalah cuaca, seperti pada bulan-bulan akhir tahun seperti ini, curah hujan tinggi, jadi bikin pekerjaan pembangunan seperti bikin darinase agak terkendala, yang tadinya butuh waktu 5 hari sampai satu minggu, gara-gara hujan bisa molor” (wawancara 24 desember 2012 pukul 13.00 WIB, di depan balai pertemuan kelurahan).

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Implementasi Tujuan Dana Hibah

a. Implementasi Prinsip Penggunaan dan Pengeloan Dana Hibah

Di dalam suatu program pastilah selalu diakhiri dengan pelaksanaan program atau kita telah mengenal dengan istilah implementasi, yang mana kali ini peneliti menggunakan suatu program dari pemerintah kota Malang yang bernama dana hibah, yang telah ada sejak tahun 2009, dalam hal ini dana hibah di dasari oleh PERWAL no.10 tahun 2010, yang menyebutkan bahwa di dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa prinsip, akan tetapi peneliti mencoba untuk memilih tiga prinsip yaitu efektifitas, efisiensi, dan transparansi.

a) Prinsip efektifitas

Dalam program dana hibah menurut peneliti prinsip efektifitas sudah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan PERWAL no.10 tahun 2010 dan dapat dipertanggung jawabkan akan tetapi efektifitas yang dimaksudkan dalam

pelaksanaan program dana hibah ini dalam hal pemotongan waktu yang mana jarak antara perencanaan program dan pelaksanaan program, dimana dalam hal ini ditengarai dengan cepatnya dana yang sudah tersedia atau dana yang didapat untuk proses pelaksanaan program kegiatan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Selain itu dengan cepatnya dana yang turun program ini dapat dikatakan mencapai sasaran atau tujuan dari pada yang sudah dirumuskan secara bersama dalam MUSREMBANGKEL sesuai skala prioritas. Seperti menurut Peter Drucker dalam Kisdarto, (2002 : 139), menyatakan :

“doing the right things is more important than doing the things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right” (efektifitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau “effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly” (efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber juga daya secara cermat).

Dari pendapat diatas sendiri dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan prinsip efektifitas dalam dana hibah itu sendiri sudah terlaksana yang mana sesuai dengan pendapat diatas dengan indikator dimana efektifitas dana hibah dinilai darimana program tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan secara bersama sebelumnya dalam MUSREMBANGKEL. Selain itu hal yang serupa juga dikatakan oleh Menurut Chester I. Barnard dalam Prawirosentono, (1999:27), yang mengatakan bahwa” *When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective.*” Yang memiliki arti Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif.

Dengan beberapa pandangan diatas dapat dikatakan bahwa program dana hibah ini dapat dikatakan melaksanakan prinsip efektifitas karena telah berhasil melakukan sesuatu program dengan benar sesuai dengan kesepakatan bersama.

b) Prinsip efisiensi

Dalam program dana hibah yang sudah berjalan dijelaskan secara gamblang dalam PERWAL no.10 tahun 2010 jika dana hibah haruslah memiliki prinsip efisiensi yang mana agar pelaksanaan dana hibah ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan dirumuskan bersama, dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah,“Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu,tenaga dan biaya)”.(1995:250), yang memiliki arti dimana suatu kegiatan dapat dikatakan efisiensi jika kegiatan tersebut dilakukan secara tepat tanpa adanya membuang-buang waktu. Selain itu menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu ,“Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”.(1994 ; 07)

Dari dua pendapat diatas dalam pelaksanaannya program dana hibah dapat dikatakan melakukan prinsip efisiensi yang sesuai dengan apa yang diindikasikan dalam kamus besar bahasa Indonesia karena di dalam pelaksanaannya. Program ini mengatakan indikator efisiensi terletak pada terserapnya suatu pendanaan dari program itu sesuai dengan apa yang sudah

dianggarkan jadi dengan demikian tidak perlu adanya penambahan dana baik itu yang diminta dari masyarakat maupun pengajuan penambahan dana itu sendiri, dalam pandangan Malayu hasibuan mungkin prinsip efisiensi ini dapat terjadi jika kondisi pelaksanaan daripada program dana hibah itu sendiri dapat didukung oleh faktor-faktor pendukung secara keseluruhan sehingga nantinya dalam pelaksanaan program tersebut akan banyak keuntungan mulai dari waktu sampai keuntungan dalam kelebihan dari proyeksi dana yang ditetapkan, tergantung dari bagaimana komponen dan faktor-faktor yang di dalamnya bekerja.

c) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002:18), dari pengertian diatas dapat kita simpulkan jika transparansi terkait dengan apa yang di sebut dengan kemampuan publik untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan, dilaksanakan, dan apa yang telah di capai oleh suatu program maupun suatu kebijakan yang ada. Dalam hal ini dana hibah dapat dikatakan sudah melakukannya hal ini sudah sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang menyebutkan bahwa, prinsip

transparansi dalam program dana hibah pada dasarnya memang sejak awal sudah terbentuk dengan sangat baik.

Dari setiap pelaksanaan program dana hibah yang selama ini telah dilakukan di tingkat kelurahan, dana untuk pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik selalu turun ke pokmas yang mana dalam hal ini Pokmas langsung terlibat melakukan nota kerjasama dengan lurah setempat yang mana dalam pencairan dananya menggunakan SPK, dan sebelum melakukan pengerjaan pihak POKMAS dan kelurahan diwajibkan membuat sebuah rencana dalam bentuk keuangan yang bersifat per proyek tidak dalam bentuk yang menyeluruh seperti RDK (rencana definitive keuangan) dalam dana hibah tahun sebelumnya.

Dalam uraian diatas dapat dikatakan jika implementasi pengelolaan dana hibah sendiri sudah memenuhi ketiga syarat yang diharapkan ada didalam suatu program yang dijalankan oleh pemerintah daerah setempat, yang meliputi Efektifitas, efisiensi, transparansi. Sedangkan di dalam implementasi penggunaannya program dana hibah meliputi pembangunan seperti gorong-gorong, pelebaran jalan, pavingisasi, pembenahan gedung serbaguna, perbaikan jalan, perbaikan drainase, kegiatan warga.

Di dalam implementasi pengelolaan dan penggunaan dana hibah ini, dari analisis peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn, karena di dalam syarat-syarat dari pendekatan tersebut cukup terwakilkan dari keadaan di tempat penelitian, hal ini di dasarkan pada hanya kesiapan dari lembaga saja yang di tekankan dan

kurang memperhatikan faktor masyarakat dan faktor eksternalnya, seperti pada penggunaannya kurang memperhatikan industri rumah tangga yang berkembang di daerah, cenderung untuk pembangunan saja, selain itu di dalam pelaksanaan proyek pembangunan faktor eksternal cenderung tidak di perhatikan sehingga membuat adanya keterlambatan di dalam proses tercapainya pembangunan.

b. Pencapaian Tujuan Dana Hibah

a) Pemberdayaan masyarakat

Dalam program dana hibah yang menjadi salah satu tujuan dana hibah dan disebutkan dalam PERWAL no.10 tahun 2010 adalah terciptanya suatu pemberdayaan masyarakat di dalam hal ini Menurut Suryono (2010:262) mengemukakan arti konsep pemberdayaan yaitu suatu proses dimana masyarakat (khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang kurang akses pada sumber-sumber daya pembangunan) harus di dorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan peri kehidupan mereka.

Dalam program dana hibah yang di terapkan pada kelurahan ciptomulyo peneliti menyimpulkan pelaksanaan pemberdayaan, sudah sesuai dengan teori diatas hal ini di tengarai dengan di dorongnya masyarakat untuk mau ikut bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini kelurahan, guna merumuskan segala sesuatu yang sifatnya berbentuk pembangunan baik fisik maupun non fisik, secara tidak langsung maka masyarakat dapat memilih sendiri kegiatan apa yang mereka inginkan.

Sedangkan prinsip-prinsip agar pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai secara optimal, Dalam Suryono (2010:263-264), Yaitu

- 1) Datangi dan dekati masyarakat yang hendak di berdayakan (*Go to People*)
- 2) Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya (*live among the people*)
- 3) Belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki (*learn from the people*)
- 4) Ajak dan ikutkan masyarakat dalam proses perencanaan (*plan with the people*)
- 5) Ajak dan libatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan rencana (*work with the People*)
- 6) Mulailah dari apa yang telah masyarakat tahu dan pahami (*Start with what people know*)
- 7) Bangunlah sesuatu dari sumber kemampuan dan modal yang masyarakat miliki (*Build on what the people have*)
- 8) Ajarilah masyarakat dengan contoh-contoh yang jelas dan dapat dilaksanakan (*Teach by showing, learn by doing*)
- 9) Jangan dipameri mereka dengan sesuatu yang menyilaukan, tetapi berikanlah mereka sesuatu pola yang realistic (*Not a showcase, but a pattern*)
- 10) Jangan tunjukkan pada mereka sesuatu yang pesimistik sebagai akhir dari segalanya, tetapi berikanlah kepada mereka suatu system yang optimis, baik dan benar (*Not odds and ends, but a system*)
- 11) Jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-potong (parsial), tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu (*Not piecemeal, but integrated approach*)
- 12) Bukan penyesuaian cara, model atau bentuknya, tetapi transformasi dari cara, model dan bentuknya (*not to conform, but to transform*)
- 13) Jangan memberikan penyelesaian akhir pada mereka, tetapi berilah kebebasan pada mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri (*Not relief, but release*)

Menurut peneliti dari apa yang terjadi dilapangan tepatnya pada kelurahan ciptomulyo, pada penerapan prinsip-prinsip dapat dikatakan memenuhi akan tetapi tidak semua prinsip yang terpenuhi pada kenyataanya, hanya ada 6 prinsip yang dapat dipenuhi dalam program dana hibah ini untuk usaha pemberdayaan masyarakat, akan tetapi ada juga 3 prinsip yang akan terlaksana

atau memiliki potensi untuk dilaksanakan kelurahan ciptomulyo dalam upaya pelaksanaan dana hibah.

Ke-6 prinsip tersebut adalah, Datangi dan dekati masyarakat yang hendak di berdayakan (*Go to People*), Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya (*live among the people*), Ajak dan ikutkan masyarakat dalam proses perencanaan (*plan with the people*), Ajak dan libatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan rencana (*work with the People*), Ajarilah masyarakat dengan contoh-contoh yang jelas dan dapat dilaksanakan (*Teach by showing, learn by doing*), Jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-potong (parsial), tetapi pendekatan menyeluruh dan terpadu (*Not piecemeal, but integrated approach*), dari ker enam prinsip tersebut peneliti dapat menyimpulkan jika dalam pelaksanaan dana hibah pada kelurahan ciptomulyo, pihak kelurahan dalam upaya mencapai tujuan dari pada dana hibah sudah menerapkan ke -6 prinsip tersebut, hal ini di tandai dengan pihak kelurahan terlibat aktif mengajak pihak masyarakat sekitar mulai dari, program perencanaan sampai pada pelaksanaan program, selain itu jikalau ada ke kurang tahuan yang menyebabkan hambatan dalam pembangunan dari masyarakat, pihak kelurahan akan mengadakan pemecahan masalahnya berupa sosialisasi atau pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat tersebut.

Sedangkan ke-3 prinsip yang mungkin bisa di kembangkan adalah, Belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki (*learn form the people*), Mulailah dari apa

yang telah masyarakat tahu dan pahami (*Start with what people know*),
Bangunlah sesuatu dari sumber kemampuan dan modal yang masyarakat
miliki (*Build on what the people have*), dalam hal ini peneliti mengatakan
kalau ke-3 prinsip tersebut dapat berjalan karena, dari apa yang data sebutkan
diatas masih minimnya pembangunan di bidang non-fisik, memang terdapat
pembangunan di bidang non fisik akan tetapi dari data yang terpapar diatas
terlihat sekali kurangnya program kepelatihan di bidang usaha, seperti usaha
industri jamu yang sudah ada di kelurahan ciptomulyo.

b) Partisipasi masyarakat

Dalam PERWAL no.10 tahun 2010 mengatakan bahwa tujuan dari
program dana hibah adalah termasuk dalam hal peningkatan partisipasi
masyarakat itu sendiri yang meliputi dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pemeliharaan itu sendiri. Yang hampir serupa juga dikatakan Cohen dan
Uphoff dalam Syamsi (1994:114) yang membedakan empat jenis partisipasi,
antara lain :

1) Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi ini merupakan keterlibatan orang-orang dalam proses
pembuatan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana
cara melakukannya.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan
dari rencana yang telah disepakati sebelumnya baik yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3) Partisipasi dalam mengambil manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Dari teori atau bahasan yang disebutkan diatas dapat dikatakan jika dalam program dana hibah selama ini dan dalam pelaksanaannya sudah melakukan ketiga point yang terdapat di dalam teori tersebut diatas, akan tetapi pada poin ke empat atau pada point d, di dalam pelaksanaannya masih bergantung pada pihak pemerintahan terkait yang mana dalam hal ini pihak tim monitoring yang melakukan tugas ini, dimana tim monitoring ini dibentuk untuk melihat apakah di dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana atau belum, walaupun ada yang terlibat dalam proses evaluasi, masyarakat yang terlibat hanya segelintir saja dana mereka yang kebanyakan berada didalam tingkat birokrasi saja, seperti anggota RT, RW, atau Kelurahan.

Rusidi dalam Siregar, (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi antara lain :

- 1) Sumbangan pikiran (idea atau gagasan)
- 2) Sumbangan materi (dana barang dan alat)
- 3) Sumbangan tenaga (bekerja atau member kerja)

4) Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan dalam proses pembangunan yang menggunakan program dalam dana hibah di kelurahan ciptomulyo yang dapat peneliti tangkap, dan peneliti analisis, dari keempat poin yang terdapat diatas semua point sudah terjadi dalam program ini. Peneliti dapat mengatakan hal ini

Karena dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa dalam semua proses dana hibah hampir melibatkan semua warga sekitar hal ini dapat ditengarai dalam proses perencanaan masyarakat yang merupakan masyarakat ahli akan memberikan ide mereka demi usulan-usulan atau ide-ide yang mana dibutuhkan masyarakat, yang bisa diwakili dalam MUSREMBANGKEL, dalam hal tenaga bagi masyarakat yang kurang ahli mereka dapat ikut serta terlibat dalam program ini meskipun tidak semuanya terlibat dengan begitu, mereka diharapkan dapat ikut serta merasakan keterlibatan masyarakat didalamnya. Sedangkan dalam hal dana mereka dapat melakukan atau mengumpulkan dana swadaya jikalau terjadi kekurangan dana di dalam proses pembangunan tersebut. Sedang dalam memanfaatkan tentu saja karena hampir semua masyarakat akan merasakan manfaat yang didapatkannya dari hasil yang telah dicapai

Dalam proses partisipasi ini sendiri peneliti akan menganalisisnya menjadi beberapa bagian yang mana akan lebih membuat gamblang pada masing-masing proses yang terdapat dalam partisipasi itu sendiri.

1. Proses perencanaan

Proses perencanaan adalah proses yang paling awal, dimana suatu kebijakan akan dibuat dan dilaksanakan, dalam proses ini kecenderungan

setiap elemen yang berada dalam lingkungan tersebut akan dilibatkan dalam penyusunannya. Menurut Ndraha dalam Suryono (2010: 256-257), antara lain:

- 1) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyahkan, menerima dengan syarat, merespon dan dalam arti menolaknya
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan dan penetapan rencana.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefits*".
- 6) Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari teori Ndraha di atas dapat ditarik kesimpulan jika dalam pelaksanaan partisipasi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dalam hal perencanaan program dana hibah di kelurahan ciptomulyo, sudah dapat dikatakan berjalan sebagaimana yang di katakan oleh Ibu Lilis selaku bagian keuangan daripada kelurahan ciptomulyo,. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui dalam teori

Ndraha dalam suryono diatas sudah terpenuhinya point A,B,C atau point ke-1-3 dari teori diatas, yang menunjukkan bahwa sejauh ini tingkat partisipasi

masyarakat kelurahan ciptomulyo sudah terlaksana di dalam proses perencanaan hal ini ditengarai dengan terlibatnya warga masyarakat melalui MUSREMBANGKEL, akan tetapi keterlibatan masyarakat disini mungkin tidak terlibat secara langsung, dalam menyampaikan usulan atau gagasan akan tetapi terlibat secara diwakilkan oleh para perwakilan masyarakat, entah melalui LSM, tokoh agama, maupun melalui struktural RT dan RW, ataupun melalui para teknisi dibidangnya yang nantinya akan bekerjasama dalam upaya pelaksanaan suatu proyek atau program yang ditetapkan bersama dalam MUSREMBANGKEL tersebut.

2. Proses Pelaksanaan Pembangunan

Proses ini merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan yang mana dalam proses ini menitik beratkan upaya bagaimana pelaksanaan di dalam program ini. Dalam pelaksanaannya di dalam teori Ndraha dalam Suryono (2010: 256-257), antara lain:

- 1) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyahkan, menerima dengan syarat, merespon dan dalam arti menolaknya
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan dan penetapan rencana.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefits*".
- 6) Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam proses ini masyarakat kelurahan ciptomulyo dilibatkan secara aktif dan penuh dalam upaya pelaksanaan program hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu lilis selaku bagian keuangan kelurahan ciptomulyo. Selain ibu lilies yang mengatakan lebih mementingkan tenaga kerja lokal dari dalam kelurahan yang nantinya diharapkan akan membuat masyarakat lebih mengerti dengan program ini dan lebih memahami dengan apa yang telah mereka laksanakan, ada juga bapak Giono selaku tenaga tukang yang terlibat mengatakan bahwa selama ini dia merasa senang dengan apa yang telah kelurahan lakukan dalam hal pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara langsung di dalamnya, yang nantinya akan membuat masyarakat merasa telah ikut serta dalam proses pembangunan yang berjalan ini.

Dari penjelasan diatas dan jika kita hubungkan dari teori Ndraha, di dalam proses pelaksanaannya di kelurahan ciptomulyo kota malang sudah dapat dikatakan memenuhi apa yang disebut dengan point ke-4 atau point D dalam upaya pelaksanaan operasional program, hal ini berkesesuaian dengan penjelasan bu lilis selaku keuangan ciptomulyo dan juga Bapak Giono selaku tukang. Dalam pelaksanaannya selama ini masyarakat sekitar diprioritaskan untuk dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan dari program yang telah di hasilkan dalam MUSREMBANGKEL. Tidak hanya para pemikir atau tenaga teknis yang dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program ini akan tetapi di dalam proses pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan tenaga non teknis ,yang mana dalam hal ini selaku pekerja yang secara aktif dan langsung akan membangun dan mewujudkan pembangunan secara fisik

tersebut. Jikalau pun dalam hal ini tenaga non teknis dari masyarakat sekitar tidak ada maka akan menggunakan tenaga non teknis dari daerah lain atau dari kelurahan lain.

Dalam pelaksanaan program ini, tidak menutup kemungkinan jika masyarakat sendiri akan melakukan bantuan dalam bentuk dana yang dilakukan secara swadaya hal ini kemungkinan besar di karenakan dengan apa yang terjadi di lapangan yang menyebabkan membengkaknya pendanaan dalam pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan ibu lilies bagian keuangan kelurahan ciptomulyo

Dari data yang tersaji di atas sangat berkesesuaian dengan apa yang dikatakan Rusidi dalam Siregar, (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi antara lain :

- 1) Sumbangan pikiran (idea atau gagasan)
- 2) Sumbangan materi (dana barang dan alat)
- 3) Sumbangan tenaga (bekerja atau member kerja)
- 4) Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Dari pelaksanaan pemberian dana swadaya masyarakat itu sendiri dapat dikatakan jika sangat berkesesuaian dengan apa yang menjadi poin b atau point ke-2, karena pemberian dana swadaya yang dilakukan oleh masyarakat di dalam upaya pelaksanaan program itu merupakan suatu jenis sumbangan yang berupa materi atau dana.

Jadi di dalam pelaksanaan dari program dana hibah ini sendiri kalau kita sesuaikan dengan teori diatas maka di dalam pelaksanaannya sudah

berkesuaian dengan dua point dasar yaitu point A, B dan C, yang mana dari point ini masyarakat sekitar sudah terlibat dalam partisipasi secara aktif, baik dalam perencanaan yang ditandai oleh para tenaga teknis lapangan yang bekerja seperti para insinyur atau para arsitek yang terlibat dalam pengerjaan proyek fisik tersebut. Dalam hal berupa sumbangan tenaga dapat dikatakan jika tenaga non teknis yang berupa tukang dari lingkungan sekitar pelaksanaan program, melakukan suatu bentuk partisipasi juga yang diibaratkan menggunakan sumbangan tenaga, akan tetapi tenaga ini juga di bayar tidak secara cuma-cuma. Dalam hal sumbangan berupa materi dilakukan masyarakat sekitar dalam upaya bantuan jika suatu program benar-benar mengalami suatu kendala atau kekurangan dana yang disebabkan oleh faktor yang tak terduga di dalam hal ini masyarakat menyebutnya sumbangan swadaya.

3. Pemeliharaan hasil pembangunan

Dalam proses partisipasi yang menjadi tujuan program dana hibah kota Malang yang ke-tiga adalah proses pemeliharaan hasil pembangunan, pada proses ini masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam upaya merawat dan menjaga apa yang sudah menjadi hasil pembangunan yang bersama-sama dirumuskan dalam MUSREMBANGKEL dan yang sudah dibangun bersama dalam sinergi suatu program pembangunan antara masyarakat dan pemerintah yang disebut dana hibah. Menurut Ndraha dalam Suryono (2010: 256-257), antara lain:

- 1) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.

- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyahkan, menerima dengan syarat, merespon dan dalam arti menolaknya
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan dan penetapan rencana.
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefits*".
- 6) Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pemeliharannya segala sesuatu yang telah tercapai ini dikatakan telah memenuhi unsur atau point yang ke lima yang disebut sebagai "*participation in benefits*", yang mana dari penjelasan diatas dikatakan bahwa dalam point ini masyarakat berpartisipasi dalam upaya menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh ibu lilis selaku bagian keuangan dari kelurahan ciptomulyo yang menyatakan bahwa masyarakat di kelurahan ciptomulyo dalam program ini dilibatkan secara langsung di dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini dengan secara tidak langsung melibatkan warga dalam upaya pembangunan, yang mana bisa terlibat langsung dengan tenaga pikiran

, maupun melalui dengan dana berupa material, secara tidak langsung akan membuat efek yang sangat besar dalam diri masyarakat sekitar yang mana masyarakat akan merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab akan apa yang terjadi dari bangunan yang secara tidak langsung mereka juga yang membangunnya. Hal ini sesuai dengan perkataan pak giono warga RW 1

Dari pernyataan bapak giono diatas yang ikut berperan dalam pembangunan jalan dan gorong, beliau menyadari tentang bagaimana dia telah ikut serta dalam program ini, dengan demikian dia juga secara tidak langsung menggunakan tenaganya untuk menyelesaikan pembangunan di dalam program ini, selain itu dia juga mengatakan akan ikut seta dan berperan aktif dalam hal perawatan dari pada apa yang telah di bangunnya, dalam hal ini perawatan yang mungkin bisa beliau lakukan adalah dengan cara membuat apa yang telah beliau kerjakan tetap bersih, yang dengan membersihkan gorong-gorong atau dengan tidak membuang sampah gorong-gorong atau drainase. Dengan kondisi dimana banyak masyarakat yang terlibat dalam suatu program pembangunan maka secara tidak langsung akan membuat tingkat partisipasi masyarakat akan suatu program dari pemerintah didalam masyarakat tersebut akan mengalami suatu sinergitas yang sangat besar, dan akan membuat masyarakat yang terlibat dalam pembangunan akan ikut seta secara sukarela dalam upaya merawat dan juga dalam upaya membuat bagaimana suatu program pembangunan tersebut berjalan lancar dan tanpa adanya hambatan, dengan demikian dapat dikatakan jika di dalam program dana hibah di kelurahan Ciptomulyo, sendiri tingkat partisipasi

masyarakat sudah cukup besar dan mau untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dana hibah

Di dalam pelaksanaan suatu program yang telah dirumuskan bersama tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi program itu terlaksana dengan baik, di dalam hal ini program yang akan di bahas adalah program dana hibah, yang di bentuk pemerintah kota Malang menggunakan sistem *bottom up* atau menggunakan rumusan dari tingkat terendah yaitu kelurahan, Peneliti membagi faktor-faktor yang terdapat di dalam pelaksanaan program dana hibah di dalam dua (2) faktor yaitu internal dan eksternal, atau faktor dari dalam dan luar.

a. Faktor internal

Di dalam suatu program yang dicanangkan pemerintah pastilah banyak tantangan yang terdapat di dalamnya karena kita ketahui bersama jika pelaksanaan suatu program banyak menemui tantangan di dalam proses pelaksanaannya, baik dari segi luar dan dalam, dalam sub bahasan ini peneliti akan menjelaskan sedikit tentang hal yang mendukung dalam pelaksanaan dana hibah di kelurahan ciptomulyo kota Malang di tinjau dari faktor internal

Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor di dalam atau faktor yang berasal dari dalam dimana program tersebut terbentuk, dalam hal ini yang menjadi faktor internal adalah para warga sendiri, para pejabat setempat seperti pejabat kota, kecamatan, pejabat kelurahan ,pejabat RT, pejabat RW,

dan organisasi rekanan kelurahan, seperti LSM ,LPMK ,dan tokoh-tokoh masyarakat serta para orang yang terlibat di dalam pelaksanaan program tersebut.

Seperti yang dijelaskan Soenarko (2005:187-191) tentang langkah-langkah dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

a) *Interpretation*

Interpretation, dalam kebijakan disini adalah berusaha mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijaksanaan dalam mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan, harus direalisasi. Program pelaksanaan, yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan , haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijaksanaan.

b) *Organization*

Organization dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dimaksud sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.

c) *Application*

Application adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu.

Di dalam ketiga tahap-tahap implementasi yang dirumuskan oleh soenarko diatas ini dapat dikatakan jika yang menjadi faktor utama atau Faktor yang

mendukung terlaksanannya implementasi melalui langkah-langkah yang dirumuskan soenarko adalah di dalam konteks internal, dan dari ketiga point yang di rumuskan oleh soenarko berada di dalam konteks internal tersebut.

Dari analisis peneliti point ke-1 atau point A yang soenarko sebutkan sebagai tahap *intrepretation* atau tahap awal yang mana bergerak mengenai pendanaan dan hasil yang akan di capai oleh kebijakan atau rumusan kebijakan tersebut, dalam hal ini pihak internal yang terkait di dalamnya adalah para pejabat di tingkat kota , yang mana para pejabat tersebut bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama dari program yang baru di bentuk,dengan membentuk suatu keputusan Walikota dalam hal ini sebagai acuan pelaksanaan dana hibah dan juga menerbitkan atauran-aturan dan tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam program dana hibah tersebut, selain itu para pejabat di tingkat ini melakukan penganggaran dalam bidang keuangan juga yang nantinya akan menjadi sumber pendanaan dari pelaksanaan program tersebut.

Sementara dai point ke -2 yang berisi *organization* dapat dikatakan dilakukan oleh pihak-pihak pejabat di daerah seperti kecamatan dan kelurahan, di dalam program dana hibah ini yang menjadi proses *organization* dimana di bentuknya tim-tim yang menjadi tindak lanjut dari point ke satu yang mana tim-tim tersebut menjadi rekanan ataupun , menjadi pengawas di mana program dana hibah ini akan berjalan. Selain itu dipilihnya suatu metode yang nantinya akan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan di dalam tujuan dari

dana hibah tersebut, di dalam hal ini pemilihan MUSREMBANGKEL menjadi acuan di dalam pembangunan yang menjadi dasar pelaksanaan dana hibah.

Dan dari point ke-3 yaitu *application*, atau point yang menjadi pelaksanaan apa yang telah dirumuskan bersama. Di dalam point ini semua elemen yang berada di dalam program tersebut bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi aturan dan ketetapan di dalam upaya pencapaian suatu program, di dalam program dana hibah hal ini ditandainya dengan pelaksanaan MUSREMBANGKEL yang diikuti oleh semua elemen di dalam masyarakat, baik tokoh masyarakat sekitar, perwakilan warga masyarakat, maupun pejabat setempat. Selain itu masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam upaya pembangunan yang sebagian besar menggunakan tenaga lokal.

Jadi analisis yang dapat peneliti simpulkan adalah jika apa yang menjadi faktor internal di dalam program dana hibah ini terlaksanakan dengan baik dan memenuhi dari langkah-langkah diatas maka secara tidak langsung pelaksanaan program dana hibah ini akan berjalan dengan baik. Akan tetapi jika dari setiap faktor-faktor internal baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya mengalami masalah maka akan membuat program tersebut akan sangat terkendala.

b. Faktor eksternal

Jika kita berbicara faktor eksternal pendukung dalam implemtasi program dana hibah, pada kelurahan ciptomulyo maka peneliti dapat menyimpulkan jika kita berbicara juga tentang faktor yang mendukung dari luar lingkup pelaksanaan program dana hibah tersebut. Seperti dari faktor cuaca, di dalam

pelaksanaan program pembangunan fisik faktor cuaca adalah faktor penting yang jika terjadi perubahan cuaca maka secara tidak langsung akan membuat pelaksanaan program pembangunan tersebut akan terkendala, seperti dalam pembangunan gapura, atau perbaikan sistem drainase.

Selain faktor cuaca, faktor yang dapat dikatakan sebagai faktor eksternal dari pengamatan peneliti adalah faktor pasar, pasar yang dimaksud adalah dimana adanya tingkat harga daripada segala macam barang-barang yang terkait dan dibutuhkan oleh pihak kelurahan dalam usaha membangun yang bersifat pembangunan fisik, seperti naiknya harga semen, pasir, kerikil, ataupun tenaga kerja yang dipekerjakan yang otomatis akan membuat adanya pembengkakan di dalam jumlah anggaran yang dibutuhkan ataupun mungkin akan menghambat terselesaikannya proses pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta dan data yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai implementasi Pengelolaan dan Penggunaan dana hibah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program dana hibah sudah memiliki unsur yang tertera di dalam PERWAL no.10 tahun 2010, tentang pengelolaan dan penggunaan dana hibah,yaitu efektifitas, yang ditandainya dengan kecepatan daripada kebutuhan dana untuk program keuangan pasca di rumuskan suatu program pembangunan di tingkan kelurahan, efisiensi yang di tandai dengan ketepatan atas pelaksanaan daripada suatu program pembangunan yang dirumuskan di dalam dana hibah secara bersama, jadi tidak ada program yang tidak dijalankan. Sedangkan transparansi ditandai dengan adanya pelaporan keuangan saat pembangunan dan juga pelaporan dana yang terpakai di tingkat warga kelurahan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT atau RW. Di dalam implementasi penggunaannya dana hibah dapat dilihat dari bentuk pembangunan yang meliputi pembangunan jalan, drainase, pelebaran jalan, gorong-gorong, perbaikan gedung bersama, dan beberapa kegiatan warga yang sudah dirumuskan dalam MUSREMBANGKEL

2. Terciptanya pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaan dana hibah di ciptomulyo yang mana di dalam hal ini pemberdayaan lebih di titik beratkan pada program pembangunan secara fisik seperti pembangunan jalan, pavingisasi, drainase, gorong-gorong, perbaikan gedung bersama, yang nantinya akan diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ,atau pada hal ini masyarakat hanya di dorong untuk mendekati sumber-sumber yang mampu membuat mereka berdaya, dan kurangnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kepelatihan atau dukungan di bidang home industri yang menjadi unggulan di kelurahan CIptomulyo.

3. Partisipasi masyarakat di dalam program dana hibah sudah dapat dikatakan terlaksana, hal ini ditandai dengan adanya keikutsertaan masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan , pelaksanaan pembangunan sampai pada pemeliharaan hasil pembangunan, selain di dalam masyarakat memberikan partisipasi mereka berupa pikiran di dalam perencanaan, berupa tenaga di dalam pelaksanaan dan pemeliharaan, masyarakat juga melakukan partisipasi berupa pemberian materi berbentuk dana swadaya di dalam upaya mencegah kekurangannya modal pembangunan di daerah mereka.

4. Faktor internal pendukung implementasi program pembangunan dana hibah , dapat dikatakan berada di dalam kordinasi lingkungan dari program dana hibah tersebut. Seperti masyarakat, pihak aparat terkait di dalamnya mulai tingkat RT sampai tingkat kota, LSM, LPMK, SKPD, selaku mitra kelurahan dan warga. Dimana jikalau semua komponen-komponen yang

disebutkan diatas dapat bekerja secara benar dan maksimal maka akan membuat program pembangunan tersebut berjalan lancar.

5. Faktor eksternal pendukungnya adalah pada faktor cuaca dan pasar yang mana didalam hal ini kedua faktor ini jikalau berubah akan secara tidak langsung menghambat dan bahkan membaut program pembangunan akan mengalami kendala berarti, akan tetapi jika kedua faktor ini tidak bermasalah maka akan membuat program pembangunan semakin berjalan lancar. .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa masukan agar pengelolaan dana hibah Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih baik untuk kedepannya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya di dalam pelaksanaan program dana hibah juga memberikan bantuan berupa dana atau modal alat ataupun ketrampilan kepada industri kecil di kelurahan ciptomulyo, seperti industri jamu yang telah ada di kelurahan ciptomulyo
2. Jika di dalam pelaksanaan program dana hibah terjadi kendala di dalam hal pelaksanaannya yang disebabkan kurangnya kordinasi antar pelaksana program dan masyarakat, hendaknya pihak pihak terkait melakukan kordinasi secara menyeluruh, dan melakukan sosialisasi agar warga mengerti dan paham kalau program tersebut sangat penting bagi warga.

3. Di dalam upaya pencegahan terjadinya perubahan waktu yang dibutuhkan di dalam suatu pembangunan yang disebabkan oleh cuaca dan kendala alam, pihak perencana hendaknya membuat prediksi secara tepat, yang di dasari atas pengalaman masa lalu, atau riset keadaan sekitar.



Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Keenam. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung* : Alfabeta
- Arikunto S, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya Dengan. Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, Jakarta : PT. Elex Media. Komputindo
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- _____. 2006. *Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Hasibuan. S. P. Melayu. 1994. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : CV. Haji Magum
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung : Humaniora.
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Khadiyanto, Parfi. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga : Jakarta.
- Maulana Agus. 1997. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Milles, Mathew dan Michel Hubeman, 1992. *Analisis Data Kualitatif diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : UI Press
- Moeleong, Lexy, 2006. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta

Parson, Wayne. Tribowo Budi Santoso (alih bahasa). 2005. *Public Policy : Pengantar teori dan praktek analisis kebijakan*. Jakarta.Prenade Media

Prasojo E, 2004. *People and Society Empowerment : Prespektive Membangun Partisipasi Publik* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. VI No. 2:10-25

Prawirosentono Suyadi, 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE

Sastroepoetro, Santoso. 1998. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumnii.

Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (keperintahan yang baik)*. Bandung : Mandar Maju

Siagian, P. Sondang,, 2005. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Siregar, BB. 2001. *Menelusuri Jejak Ketertinggalan Merajut KerukunanMelintasi Krisis*. Jakarta : Pusat P3R-YAE

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta : Sebelas Maret University

Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Soenarko, H, SD. 2005. *Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah Public*. Surabaya: Airlangga University Press

Subana & Sudrajat. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia

Sulistiyani Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gaya Media

Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia

Suryono Agus, 2001. *Teori dan Isu pembangunan*. Malang : UM Press

_____,2010.*Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*.Malang :UB Press

Suryono, Yoyon, 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendekatan Strategis dan pendidikan)*, Yogyakarta : Gama Media

Syamsi Ibnu, 1986. *Pengantar Studi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga

_____,1994. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta : Rajawali

Tjokroamidjojo Bintoro, 1988. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Yustika Ahmad Eran, 2002. *Pembangunan dan Krisis*. Jakarta : PT.Grasindo

SUMBER LAIN

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN WALIKOTA MALANG Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada masyarakat kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen dalam Negeri 2002

Buku Petunjuk Teknik Operasional Dana Hibah Tahun 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Hafiz Tanjung, Abdul.2009. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).*Sistem Akuntansi Keuangan daerah,1 9*. (Diunduh dari www3.hafiz-konsultan.com pada tanggal 6 April 2013 pukul 21.00 wib)